



IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Magister Ekonomi (M.E.) pada Program
Studi Ekonomi Syari'ah



UIN SUSKA RIAU

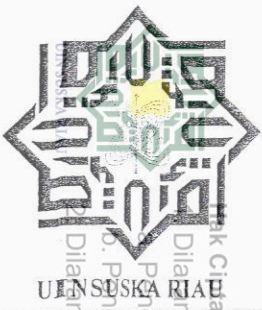
OLEH :

ARIFIN HERWANY
NIM : 21693104779

MILIK	
PERPUSTAKAAN PPS UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	
NO.	2018 99 TES
TGL	23 Juli 2018
PARAF	

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1439 H. / 2018 M.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : Un.04/PPs/PP.00.9/24/ 2018

Tesis berjudul : "IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PEKANBARU", yang ditulis oleh Sdr/i. Arifin Herwany NIM. 21693104779 telah dimunaqasyahkan pada tanggal 02 Mei 2018 dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah dengan Yudisium Baik IPK. 3,42

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Sekretaris

Alfiandri Setiawan, Lc., MA

Penguji I

Dr. Mahyarni, SE., MM


Penguji II

Dr. Husni Thamrin, M.Si

Pekanbaru, 17 Mei 2018

MENGETAHUI

Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis
mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"Implementasi Zakat
Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota
Pekanbaru"** yang ditulis oleh sdr :

Nama : Arifin Herwany
NIM : 21693104779
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 2 Mei 2018.

Penguji I,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Tgl : 11 Mei 2018

Penguji II,

Dr. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 19690806 199402 1 001

Tgl : 11 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

Dr. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 19690806 199402 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru"** yang ditulis oleh sdr :

Nama : Arifin Herwany
NIM : 21693104779
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 2 Mei 2018

Pembimbing I,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Tgl : 11 Mei 2018

Pembimbing II,

Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 19740713 200801 1 011

Tgl : 11 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

Dr. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 19690806 199402 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **"Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru"** yang ditulis oleh :

Nama : Arifin Herwany
NIM : 21693104779
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 12 Maret 2018
Pembimbing I,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Tanggal: 12 Maret 2018
Pembimbing II,

Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 19740713 200801 1 011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

Dr. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 19690806 199402 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Mahyarni, SE, MM
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Arifin Herwany

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Arifin Herwany
NIM : 21693104779
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul : **Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 12 Maret 2018
Pembimbing I

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Khairil Anwar, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Arifin Herwany

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Arifin Herwany
NIM : 21693104779
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul : **Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 12 Maret 2018
Pembimbing II

Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 19740713 200801 1 011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifin Herwany
NIM : 21693104779
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 07 Januari 1943
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **"Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12 Maret 2018
METERAI TEMPEL
Tgl. 20
9F52FAEF961468643
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arifin Herwany
NIM. 21693104779

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kehadiran Allah SWT berkat, rahmat, hidayan, inayyah-Nya Tesis ini dapat penulis selesikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap kemampuan, penulis berupaya menyusun tesis ini yang berjudul: “Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Mengingat banyaknya jasa dari semua pihak yang telah membantu, penulis menyampaikan terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Husni Tamrin, M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA., selaku Gubernur Riau yang telah memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian.

Bapak H. Marzuki, M.Ag., selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru beserta jajarannya.

Ibu Norerlinda, M.Pd., selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru beserta jajarannya.

8. Bapak dan ibu dosen serta Staf karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk dibangku kuliah.
9. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan angkatan 2016 terima kasih telah membantu menyelesaikan Tesis, berbagi keceriaan suka dan duka selama kuliah, semoga Allah membalas kebaikan antuna semua dan semoga *ukhuwah* kita tetap terjaga.

Akhir kata, penulis berdo'a kepada Allah SWT. Semoga arahan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Amin ya Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 04 Maret 2018

Penulis,

Arifin Herwany

NIM. 21693104779



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
Pedoman Transliterasi	xi
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	13
C. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Batasan Masalah	15
3. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
1. Kegunaan Secara Teoritis	16
2. Kegunaan Secara Praktis	16



BAB II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hakipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LANDASAN TEORITIS	17
A. Zakat	17
1. Definisi Zakat	17
2. Sejarah Perkembangan Zakat	20
3. Sumber Hukum Zakat	25
4. Tujuan Zakat	26
5. Hikmah dan Manfaat Zakat	27
6. Kelompok-Kelompok yang Berhak Menerima Zakat	28
7. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	40
8. Pengelolaan Zakat	42
9. Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Terkena Zakat	44
10. Penerapan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam	44
11. Peringatan Keras Terhadap Orang yang Tidak Membayar Zakat	45
12. Orang-Orang yang Tidak Membayar Zakat Dibunuh	47
B. Zakat Profesi	48
1. Definisi Zakat Profesi	48
2. Sumber Hukum Zakat Profesi	50
3. Sejarah Zakat Profesi Pada Masa Rasulullah SAW	51
4. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi	52
5. Syarat Wajib Zakat dan Harta yang Dizakati	54
6. Nishab, Kadar (Persentase Volume), Waktu Pembayaran Zakat Profesi dan Cara Menghitung Zakat Profesi	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Zakat Profesi	64
D. Penelitian Terdahulu	65
E. Kerangka Berpikir	68
F. Konsep Operasional	69

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	70
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	71
C. Subjek dan Objek Penelitian	71
1. Subjek Penelitian	71
2. Objek Penelitian	71
D. Populasi dan Sampel Penelitian	71
1. Populasi Penelitian	71
2. Sampel Penelitian	72
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	74
1. Sumber Data	74
2. Teknik Pengumpulan Data	75
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	76
1. Teknik Pengolahan Data	76
2. Analisis Data	76

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru	79
1. Sejarah	79
2. Tujuan Pendidikan	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi MAN 1 Pekanbaru	81
4. Misi MAN 1 Pekanbaru	84
5. Tujuan MAN 1 Pekanbaru	85
6. Sasaran Program MAN 1 Pekanbaru	89
7. Data Siswa	92
B. Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru	93
1. Sejarah Ringkas Madrasah	93
2. Asas dan Tujuan Pendidikan	94
3. Visi dan Misi	95
4. Struktur Organisasi	95
C. Deskripsi Data	97
1. Identitas Responden	97
2. Tanggapan Responden Terhadap Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di MAN Kota Pekanbaru	100
D. Analisis Data	113
E. Pembahasan	116
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Konsep Operasional.....	69
Tabel 2 : Jumlah Guru Pegawai Negeri Sipil Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru	72
Tabel 3 : Jumlah Sampel Percluster	74
Tabel 4 : Skor Alternatif Pilihan Jawaban Angket.....	75
Tabel 5 : Jumlah Rekapitulasi Siswa MAN 1 Pekanbaru.....	92
Tabel 6 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	97
Tabel 7 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	98
Tabel 8 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	99
Tabel 9 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Mengajar.....	99
Tabel 10 : Tanggapan Responden Mengenai Hukum Zakat Wajib Bagi Setiap Muslim	100
Tabel 11 : Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Zakat Sesuai Dengan Tuntutan Islam	101
Tabel 12 : Variabel Syariat Islam	102
Tabel 13 : Tanggapan Responden Mengenai Pengelola Zakat Memberikan Reputasi yang Baik dan Dipercaya	102
Tabel 14 : Tanggapan Responden Mengenai Layanan yang Tulus	103
Tabel 15 : Tanggapan Responden Mengenai Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Secara Keterbukaan	103
Tabel 16 : Variabel Amanah.....	104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 17	: Tanggapan Responden Mengenai Prosedur Pemanfaatan Zakat Profesi Sesuai dengan Ketentuan Berlaku.....	104
Tabel 18	: Tanggapan Responden Mengenai Pemanfaatan Zakat Profesi Sudah Dirasakan Kepada yang Berhak Menerima.....	105
Tabel 19	: Variabel Kemanfaatan	101
Tabel 20	: Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Pendistribusianya Dilakukan Secara Adil.....	106
Tabel 21	: Variabel Keadilan	107
Tabel 22	: Tanggapan Responden Mengenai Kepastian Hukum Bagi Muzakki Sudah Terlindungi.....	107
Tabel 23	: Tanggapan Responden Mengenai Kepastian Hukum Bagi Mustahiq Sudah Terlindungi.....	108
Tabel 24	: Variabel Kepastian Hukum	109
Tabel 25	: Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Zakat Profesi Konsisten Dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	109
Tabel 26	: Tanggapan Responden Mengenai Zakat Profesi Secara Efisien dan Efektif Dapat Menimbulkan Keteguhan Hati	110
Tabel 27	: Variabel Terintegrasi	111
Tabel 28	: Tanggapan Responden Mengenai Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Dapat Dipertanggungjawabkan	111
Tabel 29	: Tanggapan Responden Mengenai Informasi yang Mudah Diakses	112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Variabel Akuntabilitas	112
: Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru	113



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	: Kerangka Berpikir.....	68
----------	--------------------------	----





PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

a	ر	= r	ف	= f
b	ز	= z	ق	= q
t	س	= s	ك	= k
ts	ث	= sy	ل	= l
j	ج	= sh	م	= m
= h	ح	= dh	ن	= n
= kh	خ	= th	و	= w
= d	د	= zh	ه	= h
= dz	ذ	= ‘	ء	= ‘
	غ	= gh	ي	= y

- Vokal Panjang (*mad*) *â* = aa
- Vokal Panjang (*mad*) *î* = ii
- Vokal Panjang (*mad*) *û* = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أو ditulis *uw*, أي ditulis *ay*, dan اي ditulis *iy*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميثة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PEKANBARU

ARIFIN HERWANY
NIM: 21693104779

Zakat profesi menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek dan lain-lain. Penelitian ini ditujukan kepada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat profesi pada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. Populasi penelitian ini berjumlah 112 orang dan sampel yang diperoleh sebanyak 53 orang dengan teknik sampel menggunakan rumus Slovin yang kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket seara langsung kepada guru pegawai negeri sipil di MAN 1 Pekanbaru dan MAN 2 Model Pekanbaru dengan menggunakan skala likert kemudian diberi skor. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan kategori pengukuran "Sangat Baik" pada kategori 81%-100%, "Baik" pada kategori 61%-80%, "Netral" pada kategori 41%-60%, "Buruk" pada kategori 21%-40%, dan "Sangat Buruk" pada kategori 0%-20%. Berdasarkan analisis data dapat diketahui implementasi zakat profesi pada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru dikatakan "Sangat Baik" dengan persentase 84,42% yang berada pada 81%-100%.

Kata Kunci: *Implementasi, Zakat Profesi*



ملخص

عارفين هيرواني(٢٠١٨) : تنفيذ زكاة المهن لمدرسي الخدمة المدنية في المدارس العالية بمدينة بيجانبارو.

إن زكاة المهن حسب وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) هي الزكاة على الدخل المتأثية من تنمية إمكانيات الفرد بطريقة مناسبة للشريعة، مثل أجور العمل الروتينية ومهن الأطباء والمحامين والمهندسين والممارسين وغيرهم. هذا البحث موجه لمدرس الخدمة المدنية في المدارس العالية بمدينة بيجانبارو. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ زكاة المهن لمدرسي الخدمة المدنية في المدارس العالية بمدينة بيجانبارو. أما ميدان البحث فيكون في المدرسة العالية الحكومية الأولى بمدينة بيجانبارو، والمدرسة العالية الحكومية الثانية المثالية بيجانبارو، حيث بلغ عدد أفراد هذه الدراسة إلى ١١٢ شخصاً، وحصلت العينة على ما لا يقل عن ٥٣ شخصاً باستخدام تقنية العينة باستخدام صيغة Slovin، ثم تصنيفها باستخدام أخذ العينة العشوائية العنقودية (Cluster random sampling). وقد تم جمع البيانات عن طريق نشر الاستبيان المباشر لمدرسي الخدمة المدنية في المدارس العالية الحكومية الأولى بيجانبارو والمدرسة العالية الحكومية الثانية بيجانبارو، وذلك باستخدام مقياس (Likert) ثم تسجيله أو إعطاء النتيجة. وبجانب ذلك فإن تحليل البيانات المستخدم فيها وهي التحليل الوصفي التوعوي، وهي باستخدام فئة القياس "جيد جداً" في فئة ٨١٪ - ١٠٠٪، و"جيد" في الفئة ٦١٪ - ٨٠٪، و"محايد" في الفئة ٤١٪ - ٦٠٪، و"سيئ" على فئات ٢١٪ - ٤٠٪، و"ضعيف جداً" في الفئة ٠٪ - ٢٠٪. استناداً إلى تحليل البيانات، يمكن الملاحظة أن تنفيذ زكاة المهن لمدرسي الخدمة المدنية في المدارس العالية بمدينة بيجانبارو يُقال "جيد جداً" بنسبة ٨٤.٤٢٪ وهي ٨١٪ - ١٠٠٪.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، زكاة المهن.



ABSTRACT

Arifin Herwany (2018): The Implementation of the Zakat of Profession on Civil Servant Teachers at State Madrasah Aliyah in Pekanbaru City

The *zakat* of profession according to the National *Amil Zakat* Agency (BAZNAS) is the *zakat* on income derived from the development of self-possessed potential in a manner appropriate to the syari'ah, such as regular work wages, doctor professions, lawyers, architects and others. This research is aimed at civil servant teachers in State *Madrasah Aliyah* in Pekanbaru City, which aims at analyzing the implementation of the *zakat* of profession in civil servant teacher in State Madrasah Aliyah Pekanbaru City. Research location at State Madrasah Aliyah 1 Pekanbaru and State Madrasah Aliyah 2 Model Pekanbaru. The population of this study consists of 112 people and the sample obtained as many as 53 people with a sample technique using Slovin formula which is then classified by using cluster random sampling. Data collection was done by spreading direct questionnaire to civil servant teacher in MAN 1 Pekanbaru and MAN 2 Model Pekanbaru by using Likert scale then scored. The data analysis used was qualitative descriptive by using "Very Good" category of measurement in 81% -100% category, "Good" in category 61% -80%, "Neutral" in category 41% -60%, "Bad" in category 21% -40%, and "Very Poor" in category 0% -20%. Based on data analysis, it can be seen that the implementation of the *zakat* of profession on civil servant teachers in State *Madrasah Aliyah* Pekanbaru City is said "Very Good" with 84.42% percentage which is at 81% -100%.

Keywords: Implementation, Profession *Zakat*

1. Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan juga kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Harta zakat diperuntukkan kepada mereka yang disebutkan dalam kitab Allah,¹ yang mereka digolongkan dalam kelompok delapan, yaitu: fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, budak, orang yang berhutang atau *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."²

Selain itu, zakat adalah kewajiban yang dikenakan pada harta benda, sebagai pembuktian hubungan yang harmonis antar manusia (*habluminannas*). Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik akan mendatangkan ketenangan jiwa

¹Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ahmad Syaikh, Cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 297.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2006), hlm. 288.



dan ketentraman hidup karena harta yang dimiliki menjadi bersih dan berkah jika dikelola dengan baik dan amanah akan meningkatkan kesejahteraan umat dengan pemerataan pendapatan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an tentang objek dan sumber zakat dalam surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*³

Zakat sebagai satu-satunya ibadah wajib yang mengandung dimensi sosial ekonomi, yang dapat dijadikan sebagai kerangka dalam pembangunan ekonomi bangsa yang telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. Pada hakikatnya prinsip zakat yaitu perputaran kekayaan tersebut dapat menghilangkan kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial. Ada tiga pilar utama ekonomi Islam yaitu implementasi zakat, pelarangan riba dan pelarangan maysir. Secara ekonomi, implementasi sistem zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke dalam investasi.⁴

Istilah zakat profesi belum dikenal di zaman Rasulullah SAW, bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Fiqih yang menjadi rujukan umat ini pun tidak mencantumkan pembahasan bab zakat profesi

³Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 297.

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.



di dalamnya. Harus diingat, bahwa meski di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Di zaman itu penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana bertani dan berternak. Bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan. Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman sekarang ini justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu singkat seperti Dokter, Spesialis, Arsitek, Komputer Programmer, Pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.⁵

Pada zaman dahulu, di masa hidup dan berkarya para ulama klasik, umat manusia pada umumnya menggantungkan penghasilannya pada perdagangan, pertanian, pertambangan dan peternakan. Namun pada masa sekarang, pencarian umat manusia sudah banyak berubah dan berkembang, bukan hanya pada sektor-sektor yang disebutkan itu, tetapi telah merambah pada sektor profesi dengan mengandalkan tenaga dan pikiran, dengan penghasilan yang cukup lumayan dan bahkan melebihi dari kebutuhan.⁶

⁵Masaji Antoro, dkk, *Buku Tanya Jawab Keagamaan*, (Pustaka Ilmu Sunni Salafiah-KTB, 2013), hlm. 766.

⁶Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi & Penerapannya*, (Riau: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), hlm. 125-126.

1. Hak ipta dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zakat profesi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999,⁷ merupakan *mukhtalaf* dikalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Al-Qur'an, karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasulnya-Nya, Muhammad SAW yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.⁸

Zakat penghasilan atau profesi adalah termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyari'atkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasullullah dan Abu Bakar,⁹ yang artinya: "Dari Umar ra. beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata: "kami berhasil mendapatkan harta

⁷Lihat pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999, pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji, pendapatan yang besar dan sudah mencapai nishab, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya.

⁸Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lahimiyy al-Garna al-Syatib, *al-Muwafaqat II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 4.

⁹Asy-Syaukani, *Nail al-Authbar IV*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 184.

1. Hak Cipta dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ini ada zakat yang mencusikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata: “yang demikian itu tidak pernah dilakukan rekan sebelumku, sehingga aku pun tidak berani melakukannya”. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, diantara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata: “itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga merupakan *jizayah* yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau” (HR. Ahmad).

Di Indonesia misalnya di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula dengan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya. Juga kegiatan jasa yang melahirkan profesi bermacam-macam, seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga kesehatan (dokter dan para medis lainnya) tenaga ahli dalam berbagai bidang, tenaga pengajar, pegawai serta karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sebagainya.¹⁰

Maka dari itu perkembangan-perkembangan tersebut menuntut pemerintah untuk mengeluarkan beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, akan tetapi undang-undang ini dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI beserta Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 38

¹⁰Didin Hafiduddin, 2002: 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tahun 1999 dan mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.¹¹

Pemerintah Daerah (PemDa) juga ikut serta mengeluarkan Peraturan Daerah (PerDa) yang menyangkut pengelolaan zakat. Peraturan Daerah tersebut antara lain Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Tenate Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah di kota lainnya. Peraturan-peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengumpulan dana zakat. Peraturan-peraturan Daerah tersebut sekaligus sebagai dasar pembayaran zakat melalui pemotongan gaji PNS secara langsung, akan tetapi para PNS merasa keberatan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut dengan alasan disamping saat ini sudah banyak potongan gaji PNS, juga penyaluran zakatnya tidak transparan.

Dalam kaitannya dengan upaya mengoptimalkan pengumpulan Zakat Penghasilan (Zakat Profesi), Infak dan Shadaqah di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pemerintah Kota Pekanbaru juga turut mengeluarkan Intruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Zakat Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil

¹¹ Ibid.,

1. Hak ipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(PNS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan minimal Rp. 3.740.000,- dikenakan pemotongan Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) sebesar 2,5 %.¹²

Intruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) tersebut tidak serta merta mendapat tanggapan positif dari semua pihak. Adanya fenomena demo penolakan yang dilakukan oleh guru-guru yang keberatan gaji yang diterimanya setiap bulannya mendapat potongan 2,5% dari Dinas Pendidikan. Mereka menganggap bahwa ibadah zakat merupakan kesadaran individu bukan atas paksaan melalui pemotongan gaji seperti yang tercantum pada intruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tersebut. Selain itu, alasan pengelolaan zakat yang kurang transparan serta sosialisasi yang kurang menjadi alasan banyak terjadi penolakan di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga masa dari LSM Penjara yang berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Pekanbaru gagal bertemu dengan Wali Kota Pekanbaru. Setelah puas menyampaikan pernyataan sikapnya melalui pengeras suara, akhirnya Asisten IV bidang Kejaksaan Rakyat Pemko Pekanbaru Sentot D. Prayitno, keluar dari gedung Pemko Pekanbaru dan menemui para pengunjuk rasa. Tampak Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru Zulfahmi Andrian ikut mendampingi Sentot menemui massa yang berorasi di depan kantor Wali Kota tersebut. Di depan pengunjuk rasa, Sentot mengaku jika pungutan zakat profesi tersebut merupakan instruksi Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Nomor 1 tahun

¹²Lihat, Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2013, di mana semua PNS di pekanbaru tidak hanya guru, wajib menyerahkan zakat profesinya.¹³

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi¹⁴ belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah.¹⁵ Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksklusif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.¹⁶

¹³Lihat, Tribun Pekanbaru, "Utusan Wako Pekanbaru Tolak Penghapusan Pungutan Zakat dari Gaji PNS" dikutip dari <http://www.pekanbaru.tribunnews.com>, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Pukul 18.50 WIB.

¹⁴Yusuf al-Qardhawi menyebutkan istilah profesi dengan *Kasb al-'Amwal wa al-Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-'Amwal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseorangan atau perseorangan seperti pegawai negeri, karyawan, wiraswasta, dengan menerima upah atau gaji. Sedangkan *al-Mihan al-Hurrah*, yaitu pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain atas kemampuan atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain. Periksa al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, vol.1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), hlm. 487. Baca Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat* (Surabaya: Aulia, 2005), hlm. 215.

¹⁵Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 217.

¹⁶Lihat, Yayasan Zakat Membangun, "Zakat Profesi", dikutip dari <http://www.yazam.or.id>.



Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan. Di Lombok Timur misalnya, terdapat 21 persen pegawai negeri sipil yang kontra dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2002, tentang penerapan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil di Nusa Tenggara Barat. Pemikiran kontradiktif di atas terlihat pada kasus pemotongan 2,5% gaji para pegawai negeri setiap bulan, yang dinilai oleh sejumlah kalangan PNS belum saatnya dilakukan, karena penghasilan yang diperoleh masih tergolong rendah.¹⁷ Amien Rais pernah dituduh kafir karena menetapkan zakat profesi. Sebenarnya dia “dikafirkan” bukan karena zakat profesinya, tetapi karena ijtihadnya menetapkan dua puluh persen. Orang-orang menggugat Amien Rais dengan sejumlah pertanyaan: dalilnya apa, ayat atau haditsnya mana, metode *istinbat*-nya bagaimana? Amien Rais sendiri menjawab: “Saya bukan ahli fikih”.¹⁸

Oleh karena itu, dalam prakteknya zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan professional. Namun jika kita merujuk kepada Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 4 poin f, atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di dalam pasal 11 poin f,¹⁹ menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan

¹⁷Mohammad Ali B. Dahlan, “Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil”, dikutip dari <http://www.suara NTB Aspirasi Rakyat. News.php>.

¹⁸Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 146

¹⁹Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 497.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jasa, sehingga setiap orang Islam mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam kategori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan professional sudah tidak ada alasan bagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Intruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang zakat penghasilan (zakat profesi) tersebut, sebenarnya lebih mengarah pada implementasi dan optimalisasi zakat pegawai negeri sipil baik kemaslahatan umat Islam di Pekanbaru. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan beberapa faktor: *Pertama*, faktor diterbitkan SK Wali Kota Pekanbaru sebagai proses awal pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil melalui mediator BAZ, yang bertindak sebagai pengelola zakat. *Kedua*, memberi pemahaman bahwa kewajiban membayar zakat adalah sebagai sarana solidaritas sosial. *Ketiga*, interpretasi para ulama dan kepercayaan terhadap pengelola zakat. *Keempat*, penyediaan modal usaha dan pinjaman tanpa bunga bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau kaum *dhuafa* lainnya. Fenomena di atas dapat dilihat bahwa dengan terbentuknya UPZ dan BAZ, zakat profesi pegawai negeri sipil menjadi dilestarikan di Kota Pekanbaru.

Adapun dalam penelitian yang disusun oleh Ahmad Supardi Hasibuan (2009), menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dalam catatan sejarah hukum Islam tidak ditemukan contoh pelaksanaan zakat profesi kecuali masalah khusus mengenai penyewaan rumah yang dibicarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutny, ulama ini berpendapat bahwa seseorang yang menyewakan

1. Hak di atas individu yang bersangkutan
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumahnya yang uang sewaan nya cukup nishab, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya, tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nishab.²⁰

Selanjut penelitian oleh Syafruddin, menjelaskan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bahorok ternyata belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan profesional di Kecamatan Bahorok, belum semua professional melaksanakan zakat profesinya. Dan rendahnya realisasi zakat profesi di kalangan profesional di Kecamatan Bahorok disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah: kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran para profesional dalam menjalankan hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang zakat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masih ada diantara pegawai negeri sipil yang belum memahami secara benar tentang zakat profesi. Hal ini terlihat dari tidak adanya komunikasi yang jelas baik dari pihak pemerintah maupun Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Akan tetapi, meskipun dengan adanya

²⁰ Ahmad Supardi Hasibuan, "Konsepsi Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Penerapannya pada Masa Kini", Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau, Pekanbaru, 2009.

²¹ Syafruddin, *Implementasi Zakat Profesi di Kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat*. Tesis Magister, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2012.

1. Hak ipta melindungi Undang-Undang:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



instruksi Wali Kota Pekanbaru, zakat profesi setidaknya dapat membantu fakir miskin dalam mensejahterakan ekonomi mereka.²²

Bagi peneliti, melihat dari penelitian sebelumnya dan hasil wawancara, maka perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan zakat profesi bagi lingkungan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena pembayaran zakat profesi, yang hingga sekarang masih terlihat dengan nyata di Pekanbaru. Ada gejala penguatan terhadap zakat profesi pegawai negeri sipil, seiring dengan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman terutama pada sektor industri, jasa, dan profesi yang semakin berkembang dewasa ini.

Oleh karena itu, meskipun Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang ada di Kota Pekanbaru tidak mendapatkan tindak lanjut dari intruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Zakat Penghasilan bagi PNS dan BUMD di lingkungan Pemko Pekanbaru, seharusnya tanpa intruksi Wali Kota tersebut zakat profesi wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 4 poin f, atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di dalam pasal 11 poin f,²³ menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam kategori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan bagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

²² Hasil wawancara dengan Hermalinda, Guru PNS di MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru, pada hari Rabu, 09 Agustus 2017 pukul 17.15 WIB.

²³ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 497.

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Berdasarkan berbagai fenomena yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah atau tesis guna mengetahui sejauh mana tingkar kesadaran Pegawai Negeri Sipil untuk berzakat dalam kaitannya dengan intruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru”**.

B. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002), mengemukakan bahwa implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildacsky, juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun menurut Schubert dalam Nurdin dan Usman (2002), mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.²⁴

2. Zakat Profesi

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek dan lain-lain. Dari berbagai pendapat

²⁴Kumpulan Artikel Serba Guna, dikutip dari <http://www.el-kawaqi.blogspot.com>, pada tanggal 27 April 2017 pukul 18.40 WIB.



dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapat hasilnya, demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5% atas dasar kaidah "*Qiyas Asysyabah*".²⁵

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Masih adanya penolakan yang dilakukan oleh guru-guru yang keberatan gaji yang diterimanya setiap bulannya mendapat potongan 2,5% dari Dinas Pendidikan.
- Masih ada sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memahami tentang zakat profesi.
- Instruksi Wali Kota Pekanbaru harusnya ditujukan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kota Pekanbaru walaupun itu Madrasah Negeri yang di bawah Kemtenterian Agama, sehingga potensi zakat profesi di kalangan PNS dapat tercapai.

²⁵Badan Amil Zakat Nasional, dikutip dari <http://pusat.baznas.go.id>, pada tanggal 27 April 2017 pukul 22.07 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dan mengingat banyaknya kendala dan berbagai keterbatasan pada peneliti, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan terarah. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru, yang mana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Pekanbaru terdiri dari MAN 1 Pekanbaru beralamat di Jalan Bandeng No. 52 A dan MAN 2 Model Pekanbaru beralamat di Jalan Diponegoro No. 55.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana implementasi zakat profesi pada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru?
- Apa kendala dan solusi dalam mengimplementasikan zakat profesi pada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

- Untuk menganalisis implementasi zakat profesi pada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam mengimplementasikan zakat profesi pada guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan konsep-konsep zakat profesi dengan implementasi zakat profesi pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian masalah yang sama, juga dapat digunakan untuk mengetahui kadar objektivitas temuan-temuan penelitian sejenis dan tempat berbeda.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan implementasi zakat profesi.
- b. Dapat menjadi bahan masukan, bagi pihak yang berkepentingan tentang implementasi zakat profesi pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- c. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kinerja Pemerintah/Wali Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata *masdar* dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan zakat dari segi istilah fiqh berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disampingkan berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.

Menurut Wawan Shofyan Sholehuddin, makna zakat menurut bahasa bahwa zakat merupakan *isim* bagi kata *tazkiyah* dan bukan *mashdar*, sebab kalau *mashdar* akan tampak sebagai berikut: *Zaka yazku zaka'an wa zakwan wa zukuwwan*. Kata ini artinya sangat banyak, di antaranya yaitu tumbuh, berkembang, kesalehan, baik, hidup mewah dan senang, subur banyak rumput dan tanaman, dan layak atau kepantasan. Namun apabila *zakka yuzakki* akan memiliki arti lain di antaranya: mengembangkan, menumbuhkan, haus dahaga, menyucikan, membersihkan, memperbaiki, menunaikan, menguatkan dan memuji atau menyanjung. Adapun *azka yuzki* artinya hanya menumbuhkan atau mengembangkan. Selanjutnya apabila menjadi *tazakka yatazakka* artinya

menunaikan *sedekah* atau zakat, menjadi suci, bersih atau baik, tumbuh berkembang, adapun zakat artinya sepasang.²⁶

Sedangkan menurut istilah, Yusuf Qardawi menguraikan zakat dari segi istilah fiqh bahwa zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Nawawi mengutip pendapat Wahidi dalam karangan buku Yusuf Qardawi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu dibuat zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁷

Sedangkan makna zakat menurut syari'ah terkandung dua aspek di dalamnya, *Pertama*: sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira'ah. *Kedua*, pensucian, karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²⁸ Selain itu zakat juga menurut istilah yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada *mustahiq*-nya.²⁹

²⁶Wawan Shofyan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Tafakkur, 2014), hlm. 11-12.

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 34-35.

²⁸Wawan Shofyan Shalehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

²⁹*Ibid.*, hlm. 18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final dan tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan Islam. Adapaun unsur zakat sebagai berikut:

- a. Zakat adalah kewajiban yang bersifat material seorang *mukallaf* muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun barang.
- b. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim *mukallaf* adalah suatu keharusan.
- c. Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat pemerintah Islam, para imam mewajibkan zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah sebagai kewajiban.
- d. Zakat merupakan kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak dan tidak ada hak orang Islam untuk menentang dan menuntutnya.
- e. Zakat adalah kewajiban tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, dan tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Zakat merupakan kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60.³⁰

2. Sejarah Perkembangan Zakat

Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak sekadara kewajiban, tapi lebih dari itu zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak. Sebagai contoh adalah apa yang berlaku di daerah Yaman, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu, kesejahteraan umat tersebar merata, sampai-sampai secara ekonomi tidak ada warga yang berhak menerima zakat. Begitupun pada masa setelahnya, yakni pada periode daulah Bani Umayyah. Salah satu khalifahannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz dalam waktu singkat yakni sekitar dua tahun (99-101 H) berhasil menyejahterakan masyarakat dengan dana zakat, infak dan sedekah. Bahkan, di baitul mal dana zakat berlimpah. Hal ini sampai menyulitkan petugas amil zakat, sebab mereka kepayahan menemukan warga yang tergolong fakir miskin.³¹

Keberhasilan penerapan ekonomi Islam ini bila kita telusuri merupakan sebuah proses yang terintegrasi dari penerapan syariah Islam dalam bidang lainnya seperti dalam bidang politik, sosial, budaya, hukum dan lainnya. Allah SWT menurunkan perintah zakat pada periode Madinah. Pada

³⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 48-49.

³¹ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*, Cet. I, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), hlm. 16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq

Penegakkan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar dikenal sangat ketat. Hal ini tersirat dalam ungkapan Abu Bakar di kalangan masyarakat pada waktu itu, *“Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan sholat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak yang harus diambil dari harta kalian. Demi Allah, jika mereka menolak dilakukan pada masa Rasulullah, pasti akan aku perangi...”* (HR. Bukhari dan Muslim).³³

Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang mau menunaikan shalat tetapi enggan berzakat, karena zakat memiliki posisi yang teramat penting dalam Islam. Pada masa Abu Bakar, sistem zakat dibuat sedemikian rupa agar tidak ada dana sisa yang tersimpan, yakni dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikannya langsung setelah pengumpulan dana zakat dilakukan.³⁴

³²*Ibid.*, hlm. 16-18

³³*Ibid.*, hlm. 19.

³⁴ *Ibid.*,



b. Zakat di Masa Khalifah Umar bin Khattab

Selama 10 tahun masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kaum muslimin merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Pada masa ini tidak ditemukan satupun orang miskin yang harus menerima zakat. Penugasan Muadz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai amil zakat dapat dijadikan ilustrasi kemakmuran dan kesejahteraan umat muslim pada masa itu. Karena tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat, Muadz bin Jabal mengirimkan dana zakat yang dipungut dari Yaman kepada Umar di Madinah, akan tetapi Umar mengembalikannya. Ketika Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, “Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga”. Muadz menjawab, “Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu”.³⁵

Pada tahu kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar tetap mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, dan itupun tetap dikembalikan Umar. Muadz berkata, “Saya tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima sebagian zakat yang saya pungut”.³⁶

³⁵Ibid., hlm. 20.

³⁶Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini menggambarkan bahwa zakat dapat berperan besar dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Dalam konteks Indonesia masa kini dengan segala permasalahan kesejahteraan ekonominya, tentu hal ini pun dapat diterapkan. Melalui pengelolaan yang profesional dan dukungan dari pihak pemerintah, optimalisasi potensi zakat dapat diupayakan sebagai sarana pengentasan kemiskinan.³⁷

Dalam kisah lainnya, saat dalam perjalanan ke Damaskus, Umar bin Khattab berpaspasan dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat keadaannya yang menyedikan itu, Umar kemudian memerintahkan pegawainya untuk membantu orang tersebut. Maka, diberikanlah kepada sang Nasrani itu dana yang diambil dari hasil pengumpulan sedekah, dan juga makan yang diambil dari perbekalan pegawainya.³⁸

Kisah tersebut memberikan sedikit gambaran tentang kesadaran umat muslim pada masa itu dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah. Lebih jauh kita dapat melihat bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan seorang profesional dapat membangun dengan baik sistem perekonomian yang dirasakan tidak hanya oleh kaum muslim, tetapi juga kaum non-muslim.

c. Zakat di Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai pemimpin yang adil, jujur, sederhana, dan bijaksana. Sifat-sifatnya yang mulia itu menempatkannya

³⁷Ibid., hlm. 21.

³⁸Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai “Khalifah Kelima” dengan gelar Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz memiliki satu garis keturunan dengan Umar bin Khattab, yang merupakan teladan pada masa sebelumnya dalam mengantarkan umat menuju kecukupan harta dan kesejahteraan. Pada masa singkat pemerintahannya (99-102 H/818-820 M), Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan Yahya bin Said sebagai amil zakat ke daerah Afrika. Setelah mengumpulkan zakat, Yahya bin Said bermaksud untuk memberikannya kepada orang-orang miskin, tetapi di sana dia tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, Yahya bin Said memutuskan untuk membeli budak dengan dana zakat yang terkumpul itu lalu memerdekakan mereka.³⁹

Dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, terdapat juga kisah lain yang diriwayatkan Abu Ubaid, yakni tentang Khalifah Umar mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak. Dalam surat tersebut, Hamid bin Abdurrahman diperintahkan agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. “Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di baitul mal masih banyak uang”, jawab Gubernur Irak itu. Khalifah Umar lalu kembali menyurati Hamid bin Abdurrahman, “Carilah orang yang dililit hutang, tetapi dia tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya”. Abdul Ahmid kembali membalas surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, “Saya

³⁹Ibid., hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah membayar hutang mereka, tetapi di baitul mal tetap masih banyak uang”. Khalifah lalu memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu ia ingin menikah, nikahkan ia dan bayarkanlah maharnya”. Abdul Hamid sekali lagi menjawab, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah. Namun, ternyata di baitul mal masih banyak uang”.⁴⁰

Demikianlah, dalam waktu tiga puluh bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin di daerah Hamid bin Abdurrahman bertugas, karena semua *muzakki* mengeluarkan zakat dan pendistribusiannya tidak sebatas pada kegiatan konsumtif, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan produktif. Umar bin Abdul Aziz mengutamakan pendistribusian zakat untuk pelbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga taraf perekonomian mereka dapat terangkat. Salah satu penandanya adalah meningkatnya daya beli mereka dan roda perekonomian masyarakat secara keseluruhan pun dapat berputar dengan lebih baik.⁴¹

3. Sumber Hukum Zakat

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

⁴⁰Ibid., hlm. 22-23.

⁴¹Ibid., hlm. 23-24.



ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".⁴²

Selain itu, firmah Allah SWT dalam surat al-Rum [30] ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".⁴³

b. Dalil Sunnah

Pada suatu hari Rasullullah SAW beserta para sahabatnya/lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Wahai Rasullullah, apakah Islam itu?" Nabi menjawab, "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkan dirikan sholat, dan engkau tunaikan zakat yang difadhukan berpuasan di bulan Ramadhan" (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).⁴⁴

4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandug dua dimensi, yaitu dimensi *hablun minallah* dan dimensi *hablun minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitar. hidup dan penderitaan.
- Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil*, *mustahiq* dan lainnya.

⁴²Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 297.

⁴³*Ibid.*, hlm. 647.

⁴⁴Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.⁴⁵

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah:

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.

⁴⁵Ibid., hlm. 13.



- b. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menujut terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan tanggungjawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.⁴⁶

6. Kelompok-Kelompok yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat (dalam istilah fiqih disebut *mustahiq*) terdiri atas delapan *ashnaf* (golongan) yang tercakup dalam firman Allah SWT:

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (yakni pengurus zakat), para muallaf (orang-orang yang dijinakkan hatinya), serta demi upaya

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 13-14.



*pembebasan para budak, (menolong) orang-orang yang dihimpit hutang, dalam perjuangan fisabilillah (dijalan Allah), dan untuk para ibnu sabil (atau mereka yang memerlukan pertolongan ketika sedang dalam perjalanan). Demikianlah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijak” (QS. At-Taubah: 60).*⁴⁷

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Yaitu mereka yang tidak berhasil memperoleh keperluan pokok hidupnya, untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Termasuk untuk makan, pakaian, tempat tinggal, alat sederhana untuk bekerja dan sebagainya. Sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa seseorang disebut fakir apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya, sedangkan disebut miskin adalah yang memperoleh antara 50% sampai 80% dari kebutuhannya. Ada pula yang menyatakan bahwa yang disebut fakir adalah mereka yang tidak segan meminta-minta, sedangkan yang disebut miskin adalah yang menjaga kehormatan dirinya dari kehinaan meminta-minta, walaupun dirinya sangat memerlukan bantuan orang lain.⁴⁸

Pendapat lain juga mengemukakan fakir adalah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna

⁴⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktisi I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm. 305.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 306.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi kebutuhannya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.⁴⁹

Mustahiq yang Sekaligus Juga Pemilik Harta

Adakalanya seseorang memiliki harta yang mencapai nisab, seperti 40 ekor kambing atau sebidang tanah yang disewakan dengan sewa yang mencapai nisab dalam setahun, namun pendapatanya tidak mencukupi kebutuhannya, baik karena besarnya jumlah keluarganya atau mahalnnya harga-harga dan sebagainya. Maka di satu sisi, ia wajib mengeluarkan zakat ternaknya, sementara di sisi lain ia berhak menerima uang zakat. Menurut An-Nawawi, barang siapa memiliki sebidang tanah yang hasilnya kurang dari kebutuhan pokok hidupnya, ia dianggap miskin, berhak diberi bagian dari zakat, dan tidak boleh dipaksa menjual tanahnya itu.⁵⁰

Di antara tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan si miskin.

Maka boleh saja ia diberi zakat sejumlah yang mampu mengeluarkannya dari kemiskinan untuk masa-masa selanjutnya. Misalnya untuk dijadikan modal usaha yang dapat menghasilkan kecukupan baginya dan keluarganya.⁵¹

b. Amil (Petugas Pengumpul dan Penyalur Zakat)

Yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para mencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*. Tentunya, para petugas ini dipilih

⁴⁹Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁵⁰Muhammad Bagir, *Op.Cit.*, hlm. 306.

⁵¹*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Para amil ini boleh diberi bagian dari uang zakat yang terkumpul, maksimal seperdelapan dari jumlah keseluruhannya, walaupun mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan. Akan tetapi seandainya seperdelapan tersebut tidak mencukupi, wajib atas pemerintah mencukupinya dari kas Negara.⁵²

c. Kaum Muallaf (Orang-orang yang dijinakkan hatinya)

Yang dimaksud dengan kaum Muallaf ialah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian harta dari zakat, agar tertarik kepada agama Islam atau demi menetapkan keimanannya, atau membeli kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat muslim. Mereka ini terdiri atas dua kelompok, yakni muslim dan non-muslim.

Adapun yang termasuk muallaf dari kelompok muslim adalah:⁵³

- 1) Orang-orang yang baru masuk agama Islam atau yang masih perlu dimantapkan hatinya agar tetap dalam keimanannya. Lebih-lebih mereka yang berasal dari keluarga-keluarga non-muslim dan kini dikucilkan oleh keluarga akibat keislamannya.
- 2) Kaum muslim yang menghuni daerah-daerah perbatasan, atau yang berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir, dan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh iming-iming harta dan jabatan, sehingga keluar dari

⁵²Ibid., hlm. 306-307.

⁵³Ibid., hlm. 307.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam atau menjadi alat kaum kafir untuk menunjukkan gangguan terhadap masyarakat muslim.

- 3) Para pemimpin kelompok masyarakat atau pemuka suku, yang diharapkan dapat mempengaruhi para pengikutnya agar masuk Islam, atau mencegah kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslim.

Orang-orang seperti itu dapat dimasukkan ke dalam kategori muallaf dan menerima bagiannya dari zakat. Sedangkan kaum muallaf dari kelompok non muslim adalah:⁵⁴

- 1) Mereka yang diharapkan memeluk agama Islam namun masih perlu dilunakkan hatinya dengan pemberian-pemberian. Terutama jika mereka adalah pemimpin kaumnya, sehingga diharapkan pula dapat menarik kaum mereka memeluk agama Islam bersama mereka.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, orang-orang muallaf (orang yang dapat dibujuk hatinya) dengan zakat adalah:

- 1) Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberi zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- 2) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- 3) Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada di bawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.

⁵⁴Ibid., hlm. 307.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.⁵⁵

d. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena ia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

Adapun cara pembebasan budak antara lain dengan dua cara sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Membantu budak *mukattab*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah ia dari perbudakan.
- 2) Membeli budak untuk memerdekakan atau menambahkan keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.
- 3) Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang memang betul-betul menjadi budak.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya.

⁵⁵Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 40.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Gharimin (Orang-orang yang terhimpit hutang)

Al-Gharimin (orang-orang yang berhutang) ialah orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.⁵⁷ Adapun syarat-syarat seorang dikatakan *gharimin* adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya baik dengan harta maupun benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima zakat.
- 2) Dia berhutang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Jika orang itu boros, judi dan lain-lain maka ia tidak berhak menerima zakat
- 3) *Gharim* telah mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.

Perincian hutang yang menjadi bagian *gharimin* adalah sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bagi orang-orang yang mempunyai hutang karena kefakirannya maupun karena kebutuhannya yang mendesak, sedangkan ia tidak sanggup atau sulit melunasi hutangnya, maka orang tersebut mendapat bagian dari harta zakat sejumlah hutang yang dideritanya atau sebesar hutang yang sudah jatuh tempo. Bagian zakat untuk *gharimin* dipergunakan hanya untuk melunasi hutangnya, tidak dipperkenankan untuk keperluan yang lain.

2) Bagi orang yang memiliki hutang walaupun hutangnya pada rentenir (riba), tetapi ia sanggup melunasinya maka harta zakat boleh diberikan kepada orang yang bersangkutan digunakan untuk melepaskan diri dari riba dalam bentuk pinjaman, kemudian ia berkewajiban untuk mengembalikan pinjama itu kepada amil zakat sesuai dengan kesepakatan tertentu.⁵⁹

Mereka yang terhimpit hutang menjadi dua bagian, yaitu:⁶⁰

1) Mereka pernah berhutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup, dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat tidak mampu membayar kembali hutangnya. Sebaiknya dalam hal ini bagia uang zakat untuk orang-orang berhutang benar-benar dibayarkan secara langsung kepada pemberi hutang, bukan yang berhutang, demi membebaskannya dari hutannya itu. Adapun untuk membantu memenuhi kebutuhannya sebagai seorang miskin, telah tersedia bagian zakatnya.

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰Muhammad Bagir, *Op.Cit.*, hlm. 309.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar dan bermusuhan akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Lalu para pemuka ini membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

Orang-orang seperti itu amat besar jasanya dan amat luhur pekertinya. Oleh sebab itu, layaklah mereka itu diberi dukungan keuangan dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya, termasuk dalam hal ini bagian orang-orang berhutang dalam harta zakat. Agar orang-orang yang berakhlak mulia seperti itu tetap ada dalam setiap masyarakat di setiap masa.⁶¹

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'iy, dan Abu Daud, dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilaliy, katanya: "Aku pernah membebani diriku dengan suatu *hamaiah* (beban berupa jaminan keuangan dalam upaya mendamaikan antara dua kelompok). Lalu aku datang menemui Rasulullah SAW dan meminta beliau agar memberiku sesuatu untuk memenuhi jaminanku tersebut. Maka beliau bersabda, "*Tinggallah di sini (yakni di kota Madinah) untuk sementara, sampai kedatangan uang shadaqah (zakat) yang sedang dikumpulkan. Nanti kami akan memenuhi keperluanmu*". Kemudian beliau melanjutkan, "*Wahai Qabishah, sesungguhnya perbuatan meminta dari orang lain tidaklah halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang, yaitu seorang yang membebani dirinya*

⁶¹ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebuah hamalah, maka dibolehkan baginya meminta dari orang lain, sekadar yang dapat memenuhi bebannya itu saja, dan setelah itu hendaklah ia berhenti (yakni tidak meminta lagi). Yang kedua, seorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan hartanya. Maka halal baginya meminta sampai sekadar yang dapat menutupi kebutuhannya. Dan yang ketiga, seorang yang terjerumus dalam kemiskinan, sedemikian rupa sehingga paling sedikit ada tiga orang tokoh terhormat di antara kaumnya berkata: Si fulan ini benar telah terjerumus dalam kemiskinan! Maka halal baginya meminta, sampai sekadar yang dapat menutupi kebutuhannya yang sangat. Adapun selebihnya dari itu wahai Qabishah, tak ubahnya dengan harta haram yang dimakannya.⁶²

Berhutang Untuk Kepentingan Yayasan-Yayasan Sosial

Sama halnya seperti para pemuka masyarakat di atas, dibolehkan pula menyalurkan bagian (*gharimin*) ini dari zakat, kepada mereka yang berhutang untuk kepentingan pengelolaan panti-panti asuhan anak yatim, atau klinik berobat untuk kaum dhuafa, atau madrasah kaum muslim, (terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin, atau guna mencegah jangan sampai anak-anak kamu muslim disekolahkan di sekolah-sekolah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam) dan pelbagai amal khair seperti itu lainnya. Usaha-usaha sosial yang amat penting itu sangat layak memperoleh dukungan, karena para pengelolanya seringkali terpaksa berhutang atau menjaminkan harta atau nama dan kehormatan mereka

⁶²Ibid., hlm. 310.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian kelancaran yayasan-yayasan sosial yang mereka kelola. Orang-orang seperti ini, walaupun termasuk cukup kaya boleh diberi dari bagian *gharimin* sekadar untuk menutup hutang-hutang yang mereka bebaskan atas diri mereka sendiri.⁶³

Untuk Pinjaman Modal Para Pengusaha Kecil

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama bagian orang-orang berhutang dari zakat adalah pembebasan orang-orang yang terhimpit hutang dari beban hutang mereka. Namun beberapa pakar fiqih akhir-akhir ini, seperti Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, dan lainnya berpendapat bahwa bagian zakat untuk orang-orang berhutang dapat pula dikelola dalam suatu lembaga khusus yang memang dimaksudkan untuk usaha seperti itu. Yaitu untuk disalurkan sebagai pinjaman modal bagi para pengusaha kecil, demi menolong mereka agar tidak terjatuh dalam perangkap kaum rentenir yang tak berperikemanusiaan. Tentunya mereka itu tidak harus terjatuh dulu dalam hutang, sebelum pinjaman dari uang zakat. Yang pasti lebih baik adalah mencegah sejak semula agar mereka tidak perlu berhutang dari para rentenir seperti itu.⁶⁴

f. *Fi Sabilillah*

Pada dasarnya, bagian ini dari zakat adalah untuk para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan Negara dari serbuan tentara asing. Mereka ini berhak diberi zakat (dari bagian *fi sabilillah* atau di jalan Allah), baik mereka dalam keadaan miskin ataupun kaya.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 310-311.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 311.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula untuk persiapan-persiapan pertahanan Negara termasuk pabrik-pabrik senjata, rumah sakit tentara, dan sebagainya.⁶⁵

Akan tetapi perjuangan di jalan Allah tentunya tidak hanya terbatas dalam bidang kemiliteran saja, tetapi juga meliputi perjuangan di bidang pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya untuk pembiayaan para juru dakwah yang bertugas di daerah-daerah terpencil, guna menyeru para penduduknya agar memeluk agama Islam, ataupun memperkuat kesetiaan mereka kepada ajaran-ajaran Islam. Terlebih lagi, ketika para juru dakwah dari agama-agama lain sedang amat bersemangat menanamkan pengaruh mereka di kalangan penduduk miskin dan buta huruf, antara lain melalui cara mengiming-imingi mereka dengan hadiah-hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya.⁶⁶

Begitulah para ulama kemudian memperluas pemahaman tentang *fi sabilillah* (di jalan Allah), sehingga mencakup semua jalan melalui ilmu atau amalan yang mengantarkan kepada ridha Allah SWT, serta memenuhi kepentingan umum yang bermanfaat bagi kaum muslim secara keseluruhan, bukan bagi orang-orang tertentu saja. Tentang hal ini, Ar-Razi dalam Kitab Tafsirnya yang terkenal mengutip pendapat Al-Qaffal yang menukilkan dari beberapa kalangan fuqaha tentang makna *fi sabilillah*, bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat dan sedekah untuk berbagai macam amal kebaikan, seperti untuk penyelenggaraan jenazah (bagi orang-orang miskin), pembangunan benteng-benteng

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 311-312.



pertahanan dan pemakmuran masjid-masjid, mengingat bahwa *fi sabilillah* memiliki pengertian yang mencakup segala sesuatu seperti itu.⁶⁷

g. Ibnu Sabil

Secara harfiah, arti ibnu sabil adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam kategori ini musafir yang kebetulan kehabisan ongkos ditengah perjalananya, sehingga memerlukan bantuan keuangan. Menurut sebagian ulama, orang seperti itu boleh diberi dari uang zakat walaupun dinegerinya sendiri ia termasuk berkecukupan. Syaratnya, tidak ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya untuk biaya kepulangannya.⁶⁸

7. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

- a. Orang-orang kafir, musyrik dan atheis.
- b. Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung, dan cucu laki-laki dan perempuan.
- c. Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
- d. Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja, sebagaimana sesuai hadits Nabi SAW yang dituangkan dalam hadits HR. Ahmad, Nasai, dan At-Tirmidzi, "*Tiada Bagian di dalam zakat untuk*

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 312.

⁶⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kaya, dan tiada pula untuk orang-orang yang mampu untuk bekerja".

- e. Keluarga Rasullullah SAW dan karib-kerabatnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabiah bin Harits, sabda Rasullullah SAW “*Sesungguhnya shadaqaoh (zakat) itu tidak halal(haram) bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi sanak keluarganya. Karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia*”.⁶⁹

Di dalam buku Muhammad Bagir dalam yang berjudul *Fiqh Pratisi I*, menjelaskan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain:⁷⁰

- a. Ayah dan Anak

Zakat seseorang tidak boleh diberikan kepada anggota keluarga sendiri dalam garis keturunan di atas, yakni ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Demikian pula dalam garis keturunan bawah, yakni anak, cucu dan seterusnya. Orang-orang ini tidak berhak diberi dari uang zakat, karena sepanjang mereka tidak mampu mencari sendiri nafkah hidupnya disebabkan usia lanjutnya, atau belum mencapai usia dewasa, atau menderita penyakit yang menghalanginya dari bekerja, atau karena cacat fisik atau mental dan sebagainya, bukan karena kemalasan atau kefasikan maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 43-44.

⁷⁰ Muhammad Bagir, *Op.Cit.*, hlm. 314.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Istri

Seorang suami tidak dibenarkan memberikan zakatnya kepada istrinya sendiri, karena ia termasuk yang wajib dinafkahinya. Sama seperti anak, ayah, ibu dan seterusnya.

c. Ahlul Bait (Keluarga atau Kerabat Rasulullah)

Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW yang dimaksud di sini adalah suku Bani Hasyim dan keturunan mereka (menurut sebagian ulama, termasuk pula keturunan Bani Muththalib). Mereka tidak dibolehkan menerima zakat, karena kedudukan mulia mereka, berdasarkan sabda Nabi SAW, “*sesungguhnya shadaqah (yakni zakat) tidak layak (atau dalam versi lain: tidak halal) bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu hanya kotoran (dari harta) manusia*” (HR. Muslim).

8. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷¹ Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

⁷¹Ibid., hlm. 44.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁷²

Pengelolaan zakat dilakukan oleh bada amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. *Muzakki* dapat melakukan perhitungan sendiri haknya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri haknya dan kewajiban zakat. *Muzakki* dapat menerima bantuan dari Badan Amil Zakat atau Badan Amil Zakat memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitungnya. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*, selain zakat badan amil dapat menerima harta seperti infak, hibah, waris, *karafat* (denda yang wajib dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh yang melanggar ketentuan agama).⁷³

Hasil penerima zakat, *infaq*, *shadaqah*, hibah, wasiat, waris dan *karafat* didaya gunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama serta untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar harta zakat, *infaq*, *shadaqah*, hibah, wasiat, waris, dan *karafat* dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan merupakan pelanggaran yang

⁷²*Ibid.*, hlm. 45.

⁷³*Ibid.*, hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukuman selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banua Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).⁷⁴

9. Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Terkena Zakat

Para ahli hukum *fiqh* Islam berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan pengertian istilah kekayaan. Menurut ulama-ulama Mazhab Hanafi kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan, menurut wujudnya mempunyai dua syarat pokok, yaitu:

- a. Dipunyai atau dimiliki
- b. Bisa diambil manfaatnya

Dengan demikian, kekayaan yang hanya berwujud benda, dapat dipegang dan dimiliki. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama-ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Selain dipunyai atau dimiliki sendiri, juga dapat menggunakan manfaatnya seperti menempati rumah, memakai kendaraan dan lain-lainnya. Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelasn oleh Yusuf Qardhawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim ialah kepemilikan yang pasti/milik penuh, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang (sisahutang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (haul).⁷⁵

10. Penerapan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam, sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi Negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga *Baitul Maal*. Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah SWT. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.⁷⁶

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburut sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.⁷⁷

11. Peringatan Keras Terhadap Orang yang Tidak Membayar Zakat

Di dalam beberapa hadis lain, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya oleh karena itu hati yang lali tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan mempertakut-takuti beliau mengiring manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila juga tidak mempan, digiringlah ia secara paksa dengan

⁷⁶ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



cambuk hukum dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut. Adapun hukuman yang akan diberikan adalah:

a. Hukuman di Akhirat

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

*“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan hundul, yang dapat berbisa dan sangat menakutkan dengan bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Nabi kemudian membacara ayat: “Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka; segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat”.*⁷⁸

b. Hukuman di Dunia

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukum akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara konkrit dan legal.

⁷⁸Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hlm. 76-77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman konkrit itu misalnya seperti dikatakan oleh Nabi, yang merupakan hukuman yang langsung datang dari Yang Maha Kuasa:

Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam *al-Awsath*:

*“Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”.*⁷⁹

Hadis lain:

*“Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun. Seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.*⁸⁰

12. Orang-orang yang Tidak Membayar Zakat Dibunuh

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih daripada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang yang bersenjata yang membangkan membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk menjaga dan melindungi zakat tersebut, oleh karena darah yang tertumpah untuk membela kebenaran bukan

⁷⁹Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani di dalam *al-Awsath*, sedangkan perawi-perawinya semua dipercayai. Tetapi bagi Hakim dan Baihaqi teks di atas hadis itu adalah “bila kampung tidak berzakat, Allah akan menahan hujan”. Hakim mengatakan bahwa hadis itu menurut Muslim adalah shahih. Lihat *at-Targhib wa at-Tarhib*, Jilid I, Penerbit al-Munyarwiyah dan *Majma' az-Zawaid*, Jilid III, hlm. 96, dalam buku Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm. 78.

⁸⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazzar dan Baihaqi. Teksnya berasal dari hadis Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Hakim yang menilainya hadis shahih, dan diakui juga oleh Zuhairi yang memiliki beberapa sumber. Lihat al-Bani, *Salsala al-Ahadis as-Shahiha*, hadis nomor 105, dalam buku Yusuf Qardhawi, *Ibid.*,



tidak ada arti dan oleh karena jiwa yang melayang dalam menegakkan keadilan di atas bumi tidaklah mati dan tidak pernah mati.⁸¹

Ketentuan ini yaitu ketentuan tentang pembangkan-pembangkan yang tidak mau membayar zakat harus dibunuh, berdasarkan hadis-hadis shahih dan konsesus (*ijma'*) para sahabat. Hadis-hadisnya misalnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (*as-Syaikhan*) dari Abdullah bi Umar:

"Rasullullah bersabda: "Saya diinstruksikan untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, dan membayar zakat. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak Islam lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah".⁸²

B. Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Elsi Kartika Sari dalam *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, menjelaskan zakat secara istilah bahwa zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa *al-Mal al-Mustafad* ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama.⁸³

⁸¹Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁸²*Ibid.*, hlm. 80-81.

⁸³Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, 34.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawan Shofyan Shaleheddin dalam bukunya *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, mengemukakan bahwa profesi menurut kamus bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang dapat diandalkan untuk mendapat nafkah hidup; pekerjaan yang dikuasai karena pendidikan keahlian. Oleh karena itu keahlian, kepandaian, kemampuan, kelebihan seseorang dalam bidang tertentu yang dikembangkan atau digelutinya, bila diberdayakan dan menghasilkan uang atau barang, maka uang dan barang itu disebut upah profesi. Menurutnya, profesi meliputi pemberdayaan kemampuan berfikir atau bertenagar kasar, dan keahliannya misalnya dokter, pendidik, konsultan, entertain, buruh, karyawan, pegawai dan lain-lain.⁸⁴

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa hasil harta usaha, yaitu gaji pegawai negeri/swasta, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, konsultan, desainer, notaris, bidan seminaris, pendakwah, dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, kapal terbang, percetakan dan tempat-tempat hiburan, dan lain-lain wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan sudah cukup nisabnya.⁸⁵

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringan yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan, baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak, atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian

⁸⁴Wawan Shofyan Shalehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 205.

⁸⁵Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, hlm. 34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:⁸⁶

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan).
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

2. Sumber Hukum Zakat Profesi

- a. Dalil Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

⁸⁶ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan Ke-2, hlm. 78-79.



*melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁸⁷

b. Dalil Hadist

*“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Tidak ada zakat pada harta sampai berputar setahun”.*⁸⁸

Hadist lain, dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya”* (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: *“Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat”.*⁸⁹

3. Sejarah Zakat Profesi Pada Masa Rasulullah SAW

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW berusaha untuk meraih kekuasaan atau suku-suku dalam rangka menundukkan mekah. Sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memandang pembayaran zakat

⁸⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 67.

⁸⁸Hijrah Saputra, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 195.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 195-196.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad SAW seorang Nabi.⁹⁰

Rasullullah pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa para sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Luthaybiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais 'Ubadah bin Shamit dan Muaz bin Jabal) sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah SWT telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi, ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima yang jarang ditemukan yaitu rikaz (temuan). Karenanya kelangkaan, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah SAW, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, dan prajurit tempur

4. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium dan

⁹⁰Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yild/return*) dari harta, investasi atau modal.⁹¹

Arief Mufraini (2006), berpendapat bahwa pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Dengan demikian, contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah.⁹²

- a. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah Negara Islam terminology pendapatan ini disebut sebagai *Al-u'tiyat* (pemberian).⁹³
- b. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, term pendapatan ini dikenal sebagai Negara Islam sebagai *Al-Mal Mustafaad* (pendapatan tidak tetap).⁹⁴

⁹¹ Arief Mufraini, *Op.Cit.*, hlm. 79.

⁹² *Ibid.*, hlm. 79-80.

⁹³ Al-u'tiyat adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang dari kas Negara ataupun lainnya sebagai ganti dari kerja yang dilakukan orang tersebut atau kerja kepegawaian di kantor atau unit usaha milik Negara, pemberiar atau gaji tersebut dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dan bahkan kedua-duaya dalam suatu masa periodic tertentu, seperti bulanan, tahunan atau dalam kurun waktu lainnya yang lebih pendek selama masa kerjanya atau pada waktu pension yang disebabkan usia senja ataupun kematian. Lihat, Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakatan Ke-2, hlm. 80.

⁹⁴ Al-Mal Mustafaad adalah pendapatan yang dihasilkan seseorang yang bukan berasal dari hartanya sendiri ataupun tingkat pengembalian dari asset yang diinvestasikan, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan secara bebas dan berdiri sendiri seperti upah melakukan sebuah keterampilan kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarat Wajib Zakat dan Harta yang Dizakati

Menurut agama Islam, tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut *muzakki*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumhur ulama ialah:⁹⁵

- a. Muslim. Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut.
- b. Merdeka. Artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah tidak ada.
- c. Berakal. Seperti halnya kewajiban yang lain, membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan sebagainya.
- d. Baligh. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat maal), sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.⁹⁶

Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a. Harta telah mencapai nishabnya. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seorang dan kadar tertentu yang mewajibkannya yakni setara atau lebih dari 85 gram emas maka harta yang wajib dikeluarkan hanya 2,5% saja. Misalnya: seseorang memiliki

⁹⁵ Muhammad Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alaudin Pres, 2011), hlm. 12.

⁹⁶ Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hlm. 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harta sebanyak Rp. 72.000.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 500.000 maka nishabnya sebesar $(85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 500.000) = \text{Rp. } 42.500.000$.
maka zakatnya sebesar $\text{Rp. } 72.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.800.000$.

- Harta dalam kepemilikan penuh. Para fuqoha berbeda pendapat dalam hal ini tentang maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik. Apakah yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri ataukah harta milik yang hak pengelolannya berada di tangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli.
- Harta telah sampai setahun, menurut hitungan bulan Qamariah. Dengan demikian jika harta yang telah mencapai nishab berkurang pada masa perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya.
- Harta bukan merupakan hasil utang.
- Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini Ibnu Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan pelunasan hutang.⁹⁷
- Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang berkembang.⁹⁸

6. Nishab, Kadar (Persentase Volume), Waktu Pembayaran Zakat Profesi dan Cara Menghitung Zakat Profesi

a. Nishab

Zakat gaji, upah, honorarium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas

⁹⁷Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alaudin Pres, 2011), hlm. 14-17.

⁹⁸Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan nisab. Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul.⁹⁹ Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg¹⁰⁰ beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak diisyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.¹⁰¹

Dalam buku *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, bahwa zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang awalnya belum

⁹⁹Dalam muktamar seri studi sosial yang dilaksanakan di Syiria, Damaskus tahun 1372 H/1952 M telah disepakati, bahwa zakat profesi dapat di-*qiyas*-kan (dianalogikan dengan zakat aktiva keuangan, apabila telah terkumpul pendapatan dari hasil kerja profesi sebanyak 85 gram emas dengan kepemilikan selama setahun dan walaupun terjadi pengangguran jumlah tersebut di pertengahan tahun, maka tetap wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, dan apabila asset tersebut berkembang berlipat ganda sepanjang tahun, walaupun sudah dipotong sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, hal ini berarti bahwa asset tersebut bukanlah cadangan dana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi merupakan dana keuangan yang dapat berkembang, karena uang tersebut adalah harta yang dapat berkembang dengan penggunaan dan pemanfaatan secara ekonomi dan bukan hanya sekedar untuk penyimpanan.

¹⁰⁰Menurut instruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991. Lihat, Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 81.

¹⁰¹Arief Mufraini, *Op.Cit.*, hlm. 80-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan *qiyas* atas kemiripan (*syabbah*), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5%.¹⁰²

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan pendapat Ulama dalam menentukan nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi, yaitu:

- 1) Mazhab Empat berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta kecuali sudah mencapai nishab memiliki tenggang waktu satu tahun. Adapun nishabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%.¹⁰³
- 2) Pendapat yang di nukil dari Syeikh Muhammad Ghazali, yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nishab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10%.
- 3) Pendapat yang menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nishab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5%.¹⁰⁴ Pendapat yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, antara lain diambil dari pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud dan Mu'awwiyah. Dan juga dari

¹⁰²Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁰³Masaji Anotoro, *Op.Cit.*, hlm 769. Dalam *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, juz II, hlm. 866, 1989.

¹⁰⁴*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian seperti Imam Zuhri, Hasan Bashri, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir dan Daud Dzahiri.¹⁰⁵

- 4) Pendapat Mazhab Imamiyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah dalam surat Al-Anfaal ayat 41. Menurut menera kata-kata *ghanintum* dalam ayat tersebut bermakna seluruh penghasilan, termasuk gaji, honorarium dan pendapatan lainnya.¹⁰⁶

Bagi yang mempersamakan menetapkan prosentasi zakatnya sama dengan zakat perdagangan yakni 2,5% dari hasil yang diterima setelah dikeluarkannya segala biaya kebutuhan hidup yang wajar dan selama sisa tersebut dalam masa setahun, telah mencapai batas minimal yakni senilai 85 gram emas murni. Sedangkan yang menganalogikan hasil-hasil dari profesi tersebut dengan zakat pertanian. Dalam arti begitu ia menerima penghasilan senilai 653 kg hasil pertanian yang harganya paling murah, maka seketika itu juga ia harus menyisihkan lima atau sepuluh persen (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun.¹⁰⁷

Oleh karena itu, nishab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan kepada *maal mustafad*, maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa wajib menzakati *maal mustafad* pada waktu menerimanya apabila mencapai 85 gram emas baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya di bawah standar minimal itu tidak diwajibkan

¹⁰⁵ Ibid.,

¹⁰⁶ Ibid., hlm. 769-770.

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 770.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menzakati gajinya. Kalau demikian, maka di Indonesia tidak ada seorang pegawai pun yang kena wajib zakat. Menurut *jumhur* (mayoritas) ulama berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib ra: “*Bahwasanya ‘Abbas bin ‘Abdil Muthalib bertanya kepada Nabi SAW, tentang maksudnya untuk menegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi SAW member kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu*”.¹⁰⁸

b. Kadar (Presentase Volume)

Adapun persentase yang dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
- 2) Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer.¹¹⁰

Kada zakat menurut BAZNAS adalah dua setengah persen (2,5%) setiap mendapatkan, jika kalau pegawai negeri dan buruh tetap adalah

¹⁰⁸HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi.

¹⁰⁹Arief Mufraini, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹¹⁰Seorang peneliti berpendapat bahwa persentase zakat dari gaji, upah dan pendapat hasil kerja profesi yang bukan dunia perdagangan dalam batasan-batasan tertentu adalah dimulai dari 5% hingga mencapai 10% disesuaikan dengan besar kecilnya usaha sebagai batas persentase maksimal dan beliau telah menyampaikan sejumlah argumentasinya. Dan bukanlah lahan kerja kami untuk dapat mengkritisi pendapat ini secara terperinci, akan tetapi dapat dikemukakan suatu hal yang sangat penting yaitu adanya perbedaan antara karakter pendapatan dari kerja di bidang pertanian dengan pendapatan kerja profesi. Lihat, Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakatan Ke-2, hlm. 81-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipungut sebulan sekali pada waktu keluar penerimaan gajinya. Kadar zakatnya menurut Al-Qardawi juga 2,5%. Alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tercakup dalam pengertian keumuman pengertian zakat mata uang
- 2) Gaji, upah, honor, uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dan pikiran. Sedangkan menurut prinsip hukum Islam, kadar itu memperingan kadar kewajiban
- 3) Mengikuti amalan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah dan Umar bin Abdul Aziz dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan pegawai dimasukkan ke dalam *diwamul 'ata'*.
- 4) Kata Al-Qardawi menurut ilmu pajak, sumber pajak itu ada tiga macam modal, tenaga dan campuran modal dan tenaga kerja. Pungutan pajak dari modal lebih besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campur modal dan tenaga lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan. Oleh karena zakat dari tenaga kerja lebih baik diqiaskan kepada pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan Ibnu Abdul Aziz daripada diqiaskan kepada hasil pertanian.

c. Waktu Pembayaran

Zakat profesi dibayar saat menerima pemasukannya karena diqiaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari



© Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
sisi sini, ia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan *naqdain* (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak *rub 'ul usyur* atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

d. Cara Menghitung Zakat Profesi

Mufraini (2006) dalam bukunya yang berjudul "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*", berpendapat ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorarium dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, sebagai berikut:¹¹

1) Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji)

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi *double* pembayaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Si pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan

¹¹ Arief Mufraini, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.

2) Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya, seperti tukang kayu, penjahit dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:

- a) Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya. Dan yang terbaik menurut Mufraini, penentuan kurun waktu tersebut adalah dengan batasan kurun masa haul.
- b) Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
- c) Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
- d) Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
- e) Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi. Perhitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun,
- 2) Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahun hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati,
- 3) Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat,
- 4) Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hiriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender masehi,
- 5) Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan, pada kondisi ini dihitung sisi simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah dikeluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada perhitungan akhir haul.



C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Zakat Profesi

Faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:¹¹²

1. Syariat Islam, yaitu hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin.
2. Amanah, yaitu lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya. Menurut Sutijono, dkk., (2015), amanah terdiri dari 4 indikator utama yaitu: 1) dipercaya, 2) konsisten, 3) tulus, dan 4) terbuka.¹¹³
3. Kemanfaatan, yaitu dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.
4. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi *muzakki* dan *mustahiq*.
6. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

¹¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹³Sutijono, dkk., *Praxis Semangat Pagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya: Suatu keniscayaan Membawa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Mandiri dan Bermartabat*, Ed. I, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam Tesis ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas antar lain:

Pertama, Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang disusun oleh Ahmad Supardi Hasibuan (2009) dengan judul “Konsepsi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Penerapannya Pada Masa Kini”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah hukum Islam tidak ditemukannya contoh pelaksanaan zakat profesi kecuali masalah khusus mengenai penyewaan rumah yang dibicarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama ini berpendapat bahwa seseorang yang menyewakan rumahnya yang mana uang sewanya cukup nishab, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya, tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nishab.¹¹⁴

Kedua, Jurnal Muslim yang disusun oleh Hanik Fitriani (2016) dengan judul “Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan”. Hasil penelitiannya menjelaskan: *Pertama*, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep rasionalisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. *Kedua*, dasar ketundukan PNS lulusan pondok

¹¹⁴ Ahmad Supardi Hasibuan., “Konsepsi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Penerapannya pada Masa Kini”, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2009).

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.¹¹⁵

Ketiga, Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang dilakukan oleh Syafruddin (2016) dengan judul: "Impelementasi Zakat Profesi di Kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bahorok ternyata belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan profesional di Kecamatan Bahorok, belum semua professional melaksanakan zakat profesinya. Dan rendahnya realisasi zakat profesi di kalangan profesional di Kecamatan Bahorok disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah: kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran para profesional dalam menjalankan hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang zakat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan.¹¹⁶

Keempat, Jurnal Nuansa yang dilakukan oleh Fatati Nuryana (2016) dengan judul: "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap

¹¹⁵Hani Fitriani, "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan", *Jurnal Muslim*, Volume 1, Nomor 1, Mei-Oktober 2016, STAIN Ponorogo.

¹¹⁶Syafruddin, *Op.Cit.*,



Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan.¹¹⁷

Kelima, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang disusun oleh Agus Marimin dan Tira Nur Fitria (2015). Dengan judul: "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram dengan kewajiban zakat 2,5% yang dikeluarkan setiap satu tahun dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.¹¹⁸

¹¹⁷Fatati Nuryana, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep", *Jurnal Nuansa*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2016.

¹¹⁸Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



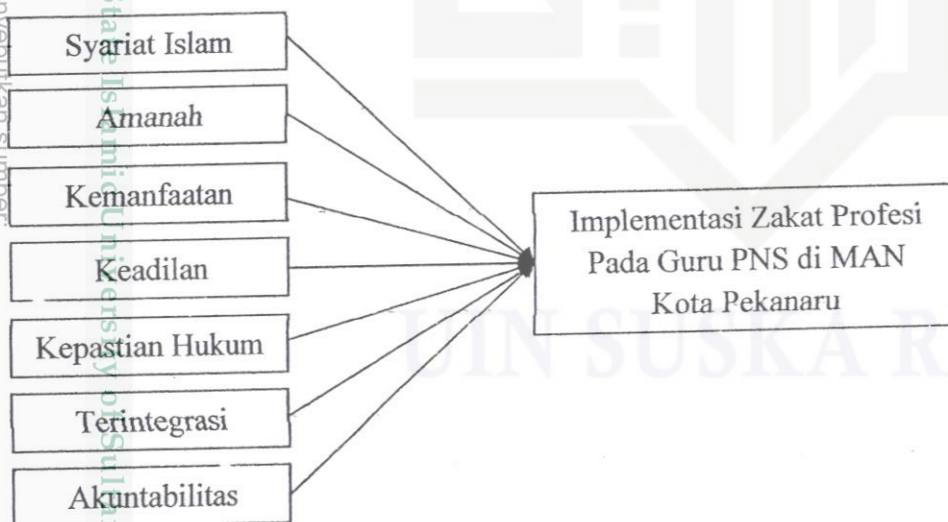
E. Kerangka Berpikir

Dari serangkaian di atas maka peneliti berasumsi bahwa zakat profesi mempunyai implementasi yang sangat baik pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru. Zakat profesi dikaji dari apa saja dan bagaimana implementasi zakat profesi, sedangkan dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) peneliti mengkaji apa saja yang menjadi kendala atau penghambat pelaksanaan zakat profess serta bagaimana solusinya.

Kedua aspek yang diteliti di atas akan dibahas dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dijadikan suatu bahan acuan mengenai zakat profesi, apakah sudah sesuai aturannya atau belum.

Untuk lebih memahami kerangka isi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:

Gambar 1: Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru	Syariat Islam	1. Hukum Islam
	Amanah	2. Dipercaya
		3. Tulus
		4. Terbuka
	Kemanfaatan	5. Prosedur pemanfaatan
		6. <i>Mustahiq</i>
	Keadilan	7. Pendistribusian yang adil
	Kepastian Hukum	8. Kepastian hukum bagi <i>muzakki</i>
		9. Kepastian hukum bagi <i>mustahiq</i>
	Terintegritas	10. Konsisten
		11. Keteguhan
	Akuntabilitas	12. Dapat dipertanggung jawabkan
		13. Mudah diakses

Sumber: UU RI No. 23 Tahun 2011

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian atau riset (*research*) adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan jawaban permasalahan atau fenomena yang dihadapi.¹¹⁹

Metode penelitian merupakan usaha penyidikan yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka peneliti menggunakan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.¹²⁰

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru yang terdiri dari: MAN 1 Pekanbaru beralamat di Jalan Bandeng No. 51 A dan MAN 2 Model Pekanbaru beralamat di Jalan Diponegoro No. 55.

¹¹⁹Punaji Setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

¹²⁰Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 37.



Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Januari 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di MAN 1 Pekanbaru dan MAN 2 Model Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah “Implementasi Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru”.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹²¹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) di MAN 1 Pekanbaru dan MAN 2 Model Pekanbaru berjumlah 112 orang. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹²¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 44.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2: Jumlah Guru Pegawai Negeri Sipil Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	MAN 1 Pekanbaru	52
2	MAN 2 Model Pekanbaru	60
Total		112

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Riau, 2017.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹²² Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Research Sampling*, yaitu bagaimana kita dapat memperoleh sampel atau sampel-sampel yang dapat mewakili populasi.¹²³

Mengingat keterbatasan peneliti yang sangat terbatas dari segi biaya, waktu dan tenaga dari besarnya jumlah populasi diatas, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin.¹²⁴

$$n = \frac{N}{1 + n(e)^2}$$

Keterangan:

n Ukuran sampel

N Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan.

¹²² Duwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*, (Yogyakarta: Mediacom, 2008), hlm. 73.

¹²³ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 168.

¹²⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10.



Dalam penelitian ini jumlah populasi (N) = 112 orang, dengan nilai kritis (e) atau batas kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 10% (0,1). Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan semakin akurat sampel menggambarkan populasi.¹²⁵ maka ukuran sampel:

$$n = \frac{112}{1 + 112(10\%)^2} = 52,83 = 53$$

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 53 orang dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *cluster random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana anggota sampelnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

$$f_i = \frac{N_i}{N}$$

Kemudian didapat besarnya sampel percluster:

$$n_i = f_i \times n$$

Keterangan:

f_i Sampling fraction cluster

N_i Banyaknya individu yang ada dalam cluster

N Banyaknya populasi seluruhnya

n Banyaknya anggota yang dimasukkan sampel

n_i Banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi sampel

$$f_i = \frac{53}{112} = 0,473$$

¹²⁵Conso G. Sevilla, et.al., *Research Methods*, (Quezon City: Rex Printing Company, 2007).

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian besar sampel percluster adalah:

MAN 1 Pekanbaru $52 \times 0,473 = 24,59 = 25$ orang

MAN 2 Model Pekanbaru $60 \times 0,473 = 28,38 = 28$ orang

Jadi, adapun besar sampel percluster dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3: Jumlah Sampel Percluster

No	Nama Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Sampel Percluster
1	MAN 1 Pekanbaru	52	25
2	MAN 2 Model Pekanbaru	60	28
	Total Keseluruhan	154	53

Sumber: Data Olahan, 2017.

E Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut pendapat Muhamad, sumber data sebagai berikut:¹²⁶

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari sampel atau objek penelitian. Pengertian data primer disini adalah keterangan atau jawaban dari pihak guru pegawai negeri sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru.
- Data Sekunder, yaitu data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga

¹²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai zakat penghasilan (Zakat Profesi).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- Angket atau kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna, pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala lima alternatif pilihan (Skala Likert). Setiap variabel diberikan skor penilaian sebagai berikut:¹²⁷

Tabel 4: Skor Alternatif Pilihan Jawaban Angket

No.	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data Olahan, 2017

- Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

¹²⁷Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 39



Kota Pekanbaru, daftar zakat profesi guru pegawai negeri sipil (PNS), serta data lain yang mendukung.

F Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data setelah semua data terhimpun dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian.¹²⁸

- Editing* (Penyuntingan), yaitu data yang telah dikumpulkan sela penelitian akan diperiksa dengan cara mengoreksi data tersebut untuk memperoleh data yang tepat dan benar.
- Coding* (Pengkodean), yaitu dengan cara memberikan tanda kode terhadap data yang dikategorikan sama.
- Tabulating*, yaitu mengelola data kualitatif sehingga data mempunyai arti.

2. Teknis Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Data Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yaitu penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Dalam penelitian ini data yang terkumpul diolah dengan deskriptif kuantitatif. Dengan rumus frekuensi relatif sebagai berikut.¹²⁹

¹²⁸Rizal Dairi, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, (Pekanbaru, UIR Press, 2010), Hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

keterangan :

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya

n = jumlah frekuensi/banyaknya individu

p = angka yang dicari persentasenya

Teknik pengukuran data penelitian menggunakan rumus lebar interval

yaitu:

$$i = \frac{R}{K} \times 100\%$$

Keterangan:

R = jangkauan (data tertinggi dan terendah)

K = Banyak kelas (kelompok)

$$i = \frac{100\% - 0\%}{5} = 20\%$$

Menentukan data presentase yang dikelompokkan:

Sangat Baik Apabila Implementasi Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru kelompok 81% - 100%.

Baik Apabila Implementasi Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru kelompok 61% - 80%.

Sedang

Apabila Implementasi Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru kelompok 41% - 60%.

Buruk

Apabila Implementasi Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru kelompok 21% - 40%.

Sangat Buruk

Apabila Implementasi Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru kelompok 0% - 20%.

Setelah hasil data dianalisis kemudian data tersebut direkapitulasi ke dalam bentuk tabel dan diakumulasikan sehingga diperoleh hasil dari analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi zakat profesi pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru. Implementasi zakat profesi dibagi menjadi 7 dimensi, yaitu: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. Berdasarkan tujuan penelitian, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian menyatakan “sangat baik”, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data dengan persentase sebesar 84,42% atau akumulasi responden jawaban berada pada persentase 81%-100% dapat dinyatakan “sangat baik”.
- b. Adapun kendala dalam implelementasi zakat profesi pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru, yaitu:
 - 1) Kurangnya sosialisasi dan informasi penerimaan dan pendistribusian dana zakat profesi;
 - 2) Tidak adanya laporan pemotongan zakat penghasilan kepada muzakki.

Sedangkan solusi dari kendala tersebut, yaitu:

- 1) Tersedianya laporan berkala kepada muzakki atas pendistribusiannya
- 2) Diberikan penyuluhan.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada guru MAN Kota Pekanbaru yang telah memiliki kesadaran untuk membayar zakat profesi, agar bisa mengajak guru dan masyarakat lainnya yang belum tergerak kesadarannya untuk membayar zakat profesi khususnya.
2. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional pelaporan pertanggungjawaban setoran zakat profesi khususnya dilakukan secara periodik agar mulai menggunakan sarana internet.
3. Kepada peneliti-peneliti berikutnya, agar lebih dalam mengeksplor berbagai potensi dan keutamaan zakat karena berbagai wilayah Indonesia lainnya masih banyak sisi menarik mengenai zakat yang berhubungan dengan masyarakat maupun masalah-masalah yang mungkin timbul dan dapat dijadikan karya tulis dan objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lahimiyy al-Garna al-Syatib. *al-Muwafaqat II*. Beirut: Dar al-Fikr
- Afifa, Agus Thayib., Shobiro Ika. 2010. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albana
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers (Puswil Riau)
- Asy-Syaukani. 1994. *Nail al-Authbar IV*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Antoro, Masaji., dkk. 2013. *Buku Tanya Jawab Keagamaan*. Pustaka Ilmu Sunni Salafiah – KTB
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqih Praktisi I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I. Bandung: Penerbit Karisma
- Dairi, Rizal. 2010. *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*. Pekanbaru, UIR Press
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang
- G. Sevilla, Consuelo et.al. 2007. *Research Methods*. Quezon City: Rex Printing Company
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, M. Iqbal. 2009. *Analisis Data Penelitian Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2010. *Zakat Profesi & Penerapannya*. Riau: Kantor Wilayah Kemeenterian Agama Provinsi Riau
- Mardani. 2013. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Martono, Nanang. 2010. *Statistik Sosial*. Yogyakarta: Gava Media
- Mufrani, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2 Jakarta: Kencana

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Ha-Cipta Diindungi Undang-Undang
- © hak cipta milik UIN Suska Riau
- statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muin, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alaudin Pres
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alaudin Pres
- Prayitno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*, Yogyakarta: Mediacom
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- _____. 2007. *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan
- Riduwan. 2014. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Saputra, Hijrah dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Shalehuddin, Wawan Shofyan. 2014. *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*. Tafakkur
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sutijono, dkk. 2015. *Praksis Semangat Pagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya: Suatu keniscayaan Membawa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Mandiri dan Bermartabat*, Ed. I. Yogyakarta: ANDI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Taimiyah, Ibnu. 2007. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ahmad Syaikh, Cet. Ke-2. Jakarta: Darul Haq
- Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*, Cet. I., Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS.

Jurnal, Tesis & Disertasi

- Fitriani, Hani. 2016. "Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan", *Jurnal Muslim*, Volume 1, Nomor 1, Mei-Oktober. STAIN Ponorogo
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2009. "Konsepsi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Penerapannya pada Masa Kini". Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau.
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. 2015. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret
- Nuryana, Fatati. 2016. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep", *Jurnal Nuansa*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember
- Syafruddin. 2012. "Impelementasi Zakat Profesi di Kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat". Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Website:

- Badan Amil Zakat Nasional, (<http://pusat.baznas.go.id>). Diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 22.07 WIB.
- Dahlan, Mohammad Ali B. "Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil". <Http://suarantbaspirasirakyat.News.php>.
- Kumpulan Artikel Serba Guna, dalam (<http://www.el-kawaqi.blogspot.com>). Diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 18.40 WIB.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tribun Pekanbaru. “*Utusan Wako Pekanbaru Tolak Penghapusan Pungutan Zakat dari Gaji PNS*”. [Http://www.pekanbaru.tribunnews.com](http://www.pekanbaru.tribunnews.com), diakses pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 pukul 18.50 WIB.

Yayasan Zakat Membangun, “*Zakat Profesi*”, dalam <http://www.yazam.or.id>.

Zamhari, “*Pengertian Dosen*”, dalam (<http://www.academicindonesia.com>). Diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 18.31 WIB.

Dokumentasi:

Hasil wawancara dengan Hermalinda, Guru PNS di MTs Negeri 3 Kota Pekanbaru, pada hari Rabu, 09 Agustus 2017 pukul 17.15 WIB.

Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru 2018.

Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru 2018.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menciptakan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

- a. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Pendistribusian**

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**Bagian Ketiga
Pendayagunaan**

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 18 -

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 20 -

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA PEKANBARU

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian yang akan saya lakukan untuk meraih gelar Magister (S2) Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pedapata mengenai **“Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru”** melalui kuesioner yang telah disediakan

Bapak/Ibu/Saudara/i kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i saya jamin sepenuhnya), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini.

Atas bantuan dan kerja sama yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaiku Wr. Wb.

Hormat Saya,

Arifin Herwany
NIM. 2169310477

UIN SUSKA RIAU



A. IDENTITAS RESPONDEN

Untuk pertanyaan dibawah ini, anda cukup memilih salah satu jawaban

- Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
- Umur : a. 15-30 Tahun d. > 60 Tahun
b. 31-45 Tahun
c. 46-60 Tahun
- Pendidikan Terakhir : a. SMA d. S2
b. Diploma e. S3
c. S1
- Lama Mengajar : a. < 1 Tahun c. 3-4 Tahun
b. 1-2 Tahun d. > 5 Tahun

B. KUESIONER

Cara menjawab pernyataan dibawah ini adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak jawaban yang merupakan pendapat anda.

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Daftar Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Syariat Islam						
1	Hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam					
2	Majelis Ulama Indonesia telah melaksanakan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) serta UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah sesuai dengan tuntutan hukum Islam					
Amanah						
3	Saya merasa pengelola zakat memberikan reputasi yang baik dan dapat dipercaya					
4	Saya dilayani dengan tulus					
5	Badan Amil Zakat menyampaikan laporan dana penerimaan dan penyaluran dana zakat secara keterbukaan (transparan)					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemanfaatan		SS	S	N	TS	STS
6	Prosedur pemanfaatan zakat profesi sudah sesuai dengan ketentuan berlaku					
7	Pemanfaatan zakat profesi sudah dirasakan kepada yang berhak menerimanya					
Keadilan		SS	S	N	TS	STS
8	Pengelolaan zakat profesi dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil					
Kepastian Hukum		SS	S	N	TS	STS
9	Kepastian hukum bagi muzakki dalam pengelolaan zakat sudah terlindungi					
10	Kepastian hukum bagi mustahiq dalam pengelolaan zakat sudah terlindungi					
Terintegritas		SS	S	N	TS	STS
11	Saya merasa pengelolaan zakat sangat konsisten dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat					
12	Saya merasa membayar zakat secara efisien dan efektif dapat menimbulkan keteguhan hati untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya					
Akuntabilitas		SS	S	N	TS	STS
13	Laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat dapat dipertanggungjawabkan baik secara horizontal maupun vertical					
14	Petugas pengelola zakat memberikan informasi yang tepat dan mudah diakses					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

➤ Apa saja kendala Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian dalam masalah zakat profesi?

Jawab:.....

➤ Bagaimana solusi Bapa//Ibu/Saudara/i sekalian dalam menghadapi masalah tersebut?



TABULASI TANGGAPAN RESPONDEN
IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PEKANBARU

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Butir Pernyataan														Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	1	4	4	3	3	5	4	2	5	4	3	2	5	4	3	48
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	2	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4	5	5	4	5	63
3. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	64
4. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	64
5. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	63
6. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	6	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	64
7. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
8. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	8	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	59
9. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	9	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	4	55
10. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	10	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	61
11. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	11	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
12. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
13. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	13	5	4	4	4	5	3	5	5	4	4	5	4	5	4	61
14. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
15. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
16. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	16	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	62
17. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	17	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	5	61
18. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	18	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	58
19. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	19	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	60
20. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	20	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	61
21. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	21	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	59
22. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	22	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	60
23. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
24. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
25. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
26. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	26	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
27. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	27	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	59
28. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	28	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	65
29. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	29	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	62
30. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	30	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	66
31. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	31	5	5	5	5	5	2	5	4	4	4	4	4	5	5	62
32. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	32	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	56
33. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	33	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
34. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	34	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
35. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	35	3	3	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	59
36. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	36	3	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	63
37. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	37	2	3	5	5	5	3	4	5	4	4	5	5	5	5	60
38. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	38	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	64
39. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	39	3	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	4	3	5	55
40. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	40	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	66
41. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	41	5	5	5	5	3	4	4	3	4	3	3	5	3	5	57
42. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	42	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	60
43. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	43	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	60
44. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	44	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	65

45	4	4	5	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	5	58
46	3	4	4	5	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	49
47	3	4	4	4	4	4	3	5	3	4	3	4	4	4	53
48	5	5	3	3	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	54
49	2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	65
50	3	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	63
51	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	5	4	4	53
52	5	5	5	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	5	54
53	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	59

Rekapitulasi Jawaban Responden														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SS	33	12	14	14	25	15	14	18	15	11	12	18	17	19
SS	9	39	37	36	25	34	32	30	34	35	33	34	31	32
N	8	2	2	3	2	3	6	5	4	7	6	1	5	2
SS	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0
STS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hari/Tanggal	No.	Nama Lengkap	Paraf
Rabu, 30 Januari 2018	1	Herluna Spd	
	2	Ishaomah. S.Si	
	3	Mulia akhirudin, Spd	
	4	Rosnida, M.pd	
	5	Siti Hastuti MS, M.Ag	
	6	Hartini	
	7	Zuriani, Spd	
	8	ELYANA, Spd	
	9	Marisa L. Spd	
	10	Zulmi, Mpd	
	11	Eka winda, M.pd	
	12	Asmiwati, M.pd.	
	13	Khairul Munir, M.Pfis	
	14	Intarna, M.pd.	
	15	Syafri Ermafulu. M.pd	
	16	Ade Irma Suryani	
	17	Bekti Maizarmis.	
	18	M. Azroi, MA.	
	19	Drs. Happy Trismas	



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	Emhadelina . M.phis	
21	Feri Hesti, Mpd.	
22	Dewi Eka S.pd.	
23	Malahayati, M.pd	
24	Erni Yusnita S.pd	
25	Irwani Ependi, M.Pd.I	



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari/Tanggal	No.	Nama Lengkap	Paraf
Rabu, 21/1/2018	1	Dr. MARDHIAH	
	2	Tina Harianti, S.Pd.	
	3	Sumono	
	4	Nuriza	
	5	Marnuli	
	6	Rosmami	
	7	Rini, S	
	8	Wirda Hayati	
	9	DIAN ANGLANI	
	10	Edriza	
	11	Minarni	
	12	Hermanik	
	13	Sarpani	
	14	Eni	
	15	Almy	
	16	VETRAS H.	
	17	Zepri H.	
	18	Irdaningrum	
	19	LILY Apriana	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	Harlunanti	
21	Titin Handayani	
22	Dr. Yulwita Afrin, M.pd	
23	M. Kedeem	
24	Azlina.	
25	yoni	
26	Zegri Hidayat	
27	Mornari	
28	Dermawan	



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang penyalahgunaan hasil penelitian, penulisan karya, atau penyusunan naskah untuk kepentingan lain.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Arifin Herwany

Nomor ID : 21693104779

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : 07 Januari 1943

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 47
القراءة : 38
القواعد : 36
النتيجة : 403

Berlaku Hingga : 08 Januari 2020



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL
The Head of Language Development Center



Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Bahasa, Keahlian, dan Keterampilan UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلاميه الحكوميه

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Arifin Herwany
ID Number : 21693104779
Date of Birth : January 7, 1943
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 50
Reading Comprehension : 50
Overall Score : 500

Expire Date : January 26, 2020



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed- TESOL
NIP. 196510281997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX.1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

Nomor : Un.04/PPs/TL.00/2764/2017

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Izin Riset

Kepada Yth:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: Arifin Herwany
NIM	: 21693104779
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang, 07 Januari 1943
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Semester	: III (Tiga)
Program	: Magister (S2) Program Pascasarjana UIN Suska Riau
Judul Tesis	: Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)-Kota Pekanbaru

Sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis / menyelesaikan kuliah pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dapat diberikan Rekomendasi / Izin Penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.



Pekanbaru, 19 Desember 2017

Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/11097
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET LOKAL DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PPs/TL/002764/2017 Tanggal 19 Desember 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ARIFIN HERWANY |
| 2. NIM / KTP | : | 21693104779 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. MAN 1 PEKANBARU
2. MAN 2 MODEL PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

a.n. GUBERNUR RIAU

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



EXARERITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/33

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/11097 tanggal 28 Desember 2017, perihal pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data untuk bahan Tesis.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

ARIFIN HERWANY
21693104779
PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
EKONOMI SYARIAH
PEKANBARU
S2

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA PEKANBARU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Januari 2018

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS

Ni. LILI SURYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680205 198909 2 001

Tembusan :

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sae Islamic University of Sultanarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru

Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513

Email : tu.pekanbaru@yahoo.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

B- 052 /Kk.04.5/TL.00/01/2018

04 Januari 2018 M

16 Rabiul Akhir 1439 H

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala:

1. MAN 1 Pekanbaru

2. MAN 2 Pekanbaru

Di

Pekanbaru

Dengan hormat,

Memperhatikan maksud surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No: 071/BKBP-REKOM/2018/33, tanggal 04 Januari 2018, perihal seperti pokok surat, akan datang menghadap Saudara:

Nama

: Arifin Herwany

NIM

: 21693104779

Fakultas

: Pascasarjana UIN SUSKA Riau

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Jenjang

: S2

Alamat

: Pekanbaru

Bermaksud melakukan penelitian di Madrasah yang Saudara Pimpin, guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul:

"Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pekanbaru".

Untuk maksud tersebut kiranya Saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Edwar S. Umar

Tembusan:

Ka. Katwil Kementerian Agama Propinsi Riau

Dekan Fakultas Pascasarjana UIN SUSKA Riau

Yang bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan Arifin Ahmad Simpang Rambutan No. 1 Pekanbaru

Telp: 0761 66513, 66504, 61802 Faximile : 66513

Email : tu.pekanbaru@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

04 Januari 2018 M

16 Rabiul Akhir 1439 H

: B- C/ /Kk.04.5/TL.00/01/2018

: ---

: Rekomendasi / Penelitian

Nomor
Sifat
Perihal

Yth. Sdr. Arifin Herwany

Pekanbaru

Dengan hormat,

Dalam Rangka Menata Kearsipan dan Kepustakaan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, kami mohon kiranya kesediaan saudara/i untuk melakukan penelitian di bawah lingkungan Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru, agar menyumbangkan satu Exemplar hasil risetnya.

Agar hasil riset tersebut menjadi sumber informasi yang berguna bagi instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



Edwar S. Umar

Catatan:

Pas Photo 4x6 warna 1 lembar

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1

Jalan :Bandeng No. 51 A Pekanbaru 28282

Telepon : (0761) 35521 Faximile : (0761) 35521

Website : www.man1pekanbaru.sch.id

13 Maret 2018

Nomor : B.387/Ma.04.3/TL.00/03/2018

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth :

Dekan Ekonomi syariah Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti surat Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tanggal 04 Januari 2018 perihal sebagaimana dipokok surat, bahwasanya mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : ARIFIN HERWANI
 NIM : 21693104779
 Semester / Tahun : IV (Empat) / 2018
 Program Study : Ekonomi syariah
 Fakultas : Syariah UIN Suska Riau

Telah selesai melaksanakan Pra Riset guna mendapatkan Data yang berhubungan dengan penelitiannya dilingkungan Madarasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala MAN 1 Pekanbaru



Marzuki

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2

AKRIDITASI : A
(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)

Jalan Diponegoro No. 55 Telephon./Faximile.(0761) 23242 Pekanbaru

Website: <http://www.man2pku.sch.id> Email : info@man2pku.sch.id, m2m_pku@yahoo.com



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 040 /Ma.04.7/PP.00.6/01/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru**,
menerangkan bahwa :

Nama **ARIFIN HERWANY**
NIM **21693104779**
Fakultas **Pascasarjana UIN Suska Riau**
Jurusan **Ekonomi Syari'ah**
Jenjang **S2**

Bahwa nama tersebut diatas kami izinkan untuk Penelitian di MAN 2 Pekanbaru dengan
judul **"IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA PEKANBARU."**

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Januari 2018



RERLINDA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	15/10/2018	Koreksi Tesis & Kuesioner	my	
2.	29/11/2018	Ace kuesioner & turun lapangan	my	
3.	10/2	Perbaiki Pembahasan	my	
4.	21/2	Perbaiki & lengkapi Data di Pembahasan	my	
5.	2/3/2018	Melengkapi Abstrak di	my	
6.	3/3	Ace	my	

Catatan : Pekanbaru, Januari 2018.

*Coret yang tidak perlu

Pembimbing I / Promotor*

Handwritten signature

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan : Pekanbaru, 2018.

*Coret yang tidak perlu

Pembimbing I / Co Promotor*

Handwritten signature



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Arief Herwani
 NIM : 21693104779
 PROGRAM : Pascasarjana / Magister
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	10 Maret 2017	Peran Ayah Terhadap Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an	1/317	
2				
3		Pemahaman Iddah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam KHI		
4				
5		Hadis-Hadis Kitab Tafsir An-Nur Karya Hasyi As-Siddiqi (1904-1975) Studi Kritis Sanad Dan Matan		
6				
7				
8		Studi Komparasi Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi Tentang Hukum Zakat Madu		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 21 / 03 / 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Diambil dari UIN Suska Riau
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Arifin Herwany

2693A04779

Pascapajana / Magister

Ekonomi Islam

© Hak cipta
Hak Cipta Dilindungi
1. Ilmiah
NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	16 Maret 2017	Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PAI Di Suku Se Kecamatan Pangkajene Lesung Kab. Pelalawan		
2				
3				
4	16 Maret 2017	Strategi Guru PAI Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Suka Se-Kecamatan Pangkajene Kertinci Kab. Pelalawan		
5				
6	16 Maret 2017	Konsep Pendidikan Ahlak Anak Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam		
7				
8	16 Maret 2017	Implementasi Pendidikan Karakter Dalam K-13 Di Sukan Se-Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan		
9				
10	16 Maret 2017	Pengaruh Pelatihan Dan Sumber Belajar Terhadap Keterampilan Mengajar Guru PAI Di SMPN Se-Kecamatan Bandar Sei Kumpang Kab. Pelalawan		
11				
12				
13	16 Maret 2017	Pengaruh Perilaku Belajar Dan Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman Agama Islam		
14				
15				

Pekanbaru, 21 / 03 /

2018.

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Masalah


© Hak cipta milik PT Suka Ria

Arifin Herwandy

21693 04 779

Pasca sarjana / Magister
ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	23-03-2017	- Khatibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Zhakiri).		
4		- Demonstrasi Hafalan Al-Qur'an sebagai Mahor Dalam Perspektif Hukum Islam		Suhaimi
4		- Batas Minimal Usia Nikah (Studi Analisis KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam		Syahruman
8		- Ayat - Ayama Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Perintah Menikahkan Orang yang Tidak Memiliki Pasangan Hidup		Sarbaeni
10		- Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Urgensi Zakat		Jali Asmar
14				
15				

Pekanbaru, 21/03/ 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti seminar.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

lah



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Arif Herwary
NIM : 2169304779
PROGRAM : Pascasarjana / Magister
KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan dan menyebarkan sumber
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Senin 27 Februari 2017	1) Strategi Guru PAI Mengatasi Masalah Learning Disabilities Siswa Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SLB N) se- Kab. Bengkalis		
2		2) Manajemen Pengembangan Dan Pembinaan Pendidikan Islam Pada Masjid Panipurnan		
3		3) Pengaruh Kegiatan Pidato Keagamaan Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMA Negeri Di Kec. Teluk Meranti		
4		4) Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Melaksanakan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan		
5		5) Kemampuan Guru PAI Dalam Melaksanakan Penilaian Autentik Siswa Di SMA Muhammadiyah Se- Kota Pekanbaru		
6		6) Hubungan Antara Kreativitas Guru Dalam Mengelola Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri Se- Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 21/03/ 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

~~Arifin~~ Arifin Herwany
: 21.69.3104.779
: Pascasarjana / Magister
: Ekonomi Syariah
:

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	21 Maret 2017	1. A Comparison Between The Effect Of Using Collaborative Strategic Reading (CSR) And Gist Strategy On Students' Reading Comprehension At SMPN 27 Pekanbaru	2/8/17 K/3	
2		2. A Comparison Between The Effect Of Using Magnet Summary Strategy And Herringbone Strategy On Students' Reading Comprehension At SMK Kansai Pekanbaru.		
3		3. The Comparison Between The Effect Of Using Strategy And Read, Imagine, Describe, Evaluate And Repeat (RIDER) Strategy In Student Reading Comprehension At Junior High School 3 Berau		
4		4. The Relationship Between Students' Reading Interest And Vocabulary Mastery On Their Reading Comprehension At SMAN 11 Pekanbaru.		
5		5. The Effect Of Using Exit Slips On Students' Writing Ability And Reading Comprehension At Language Development Center Of UIN Suska Riau.		
6		6. The Effect Of Using Digital Story Telling On Students' Reading Comprehension At Language Development Center Of State Islamic Of Suska Riau.		
7		7. The Influence Of Listening Strategy And Listening Anxiety To Ward Student Listening Comprehension At English Education Program Islamic University Of Riau.		

Pekanbaru, 21/03/2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Anifin Herwany
 : 21693104799
 : Pascasarjana / Magister
 : Ekonomi Syariah
 :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Tidak diperbolehkan untuk menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	amis 09 Maret	A Comparison Between The Effect Of Using Crossword Puzzle And Word Search Puzzle Game On Students' Vocabulary Mastery At STIP IT Bangkinang		
2		The Effect Of Using SQ4R Technique On Students' Reading Interest And Reading Comprehension At STAN 1 Pangkajene		
3		uras Pelalawan		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 21/03/

2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Arifin Herwani
21693104779
Pascasarjana / Magister
Ekonomi Syariah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau menyalin seluruh atau sebagian dari tulisan ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Jumat, 10 Februari 2017	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Warabah Dalam Memilih Asuransi Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Tabatul Keluarga PO Riau Agency)		
2	Jumat, 10 Februari 2017	Investasi Dalam Perspektif Syariah : Mengenal Risiko dan Manajemen Risiko dlm Investasi Syariah		
3	Jumat, 10 Februari 2017	Pengaruh Intensif dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu		
4	Jumat, 10 Februari 2017	Implementasi Transaksi Syariah Terhadap Perilaku Pedagang Salak di Pagak Buah Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan Menurut Ekonomi Islam		
14				
15				

Pekanbaru 20 Februari 2018.
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM

PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

: Arifin Herwary
: 21693104779
: Pascasarjana / Magister
: Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Rabu, 08 Februari 2017	Hukum Talak Dalam Keadaan Marahi Menurut Ibnu Qayyim At-Jauziah dan perbandingan Dengan Kompleksasi Hukum Islam di Indonesia.		
2				
3				
4	Rabu, 08 Februari 2017	Peran Aisyah Dalam Melahirkan Rincayot Hafist Nabi Dan Implikasinya Terhadap Istmbat Hukum.		
5				
6				
7	Rabu, 08 Februari 2017	Metodologi Muhammadiyah Dalam Memahami Hadits Nabi (Studi Terhadap Kitab Himpunan Putusan Tajiti)		
8				
9				
10	Rabu, 08 Februari 2017	Pengaruh Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam menggunakan sosial media Bagi wanita yg Telah bersuami di Tinjau dari perspektif kajian Ushul Fiqh Sadduz'zariah.		
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 21 / 03 / 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Arifin Herwary
2169 21 04 719
Pascasarjana / Magister
Ekonomi Syariah

NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	24 February 2017	The Effect Of Using Picture Series on Student's Writing Ability and Their Self-Efficacy at Language Development Center Of UINW Suska Riau		Alex Ohn Jahan On
2		The Effect Of Using Reciprocal Teaching Technique On Student's Reading Comprehension and Their Reading Interest at Language Development Center Of UINW Suska Riau Pekanbaru		Darul Kholis
3		The Influence Of Student's Performance Toward Their Speaking Ability And Attitude Of Theater In Extracurricular Of SMK Muhammadiyah 3 PKU		Postina
4		The Comparison Between The Effect Of Using Role, Audience, Format, Topic (CAERT), And Group Summarizing Strategies On Student's Grammar and Vocabulary Mastery Toward Their Writing Ability at SMP N1 Bangkinang		Rahma Yulis
5		The Relationship Between Student's Grammar And Vocabulary Mastery Toward Their Writing Ability at Language Development Center Of UIN Suska Riau		Fitriyanti, sunars
14				
15				

Pekanbaru, 21/03 / 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

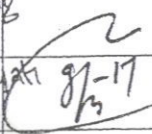
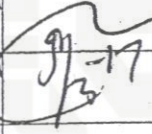
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Arief Hidayat
: 2693104799
: Pascasarjana / Magister
: Ekonomi Syariah

NAMA :
NIM :
PROGRAM :
PRODI :
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis, 9 Maret 2017	Pengaruh Penggunaan Cooperatif Learning Terhadap Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Siswa Di ruts Muhammadiyah Sekota Pekanbaru.		
2				
3				
4		Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Merencanakan Nilai-Nilai Multikultural Di SMA N Se-Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 21/03/2018
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



BIODATA PENULIS

Nama : Arifin Herwany
 Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 07 Januari 1943
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat Rumah : Jalan Tembusu Blok C 22 No. 7 Desa Pandau Jaya
 Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
 No.Telp/HP : 0813 6532 8273
 Nama Orang Tua : CH. Rachman (Ayah)
 Sanimah / Rumlah (Ibu)
 Nama Istri : Nurhayati
 Nama Anak : 1. Netti Martini
 2. Surya Hafri
 3. Aldrin Herwany
 4. Rianita Herwany
 5. Wulansari Putri

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Palembang : 1949 Lulus Tahun 1955
 SMP Tanjung Karang : 1955 Lulus Tahun 1958
 SMU Tingkat Atas Bagian Ilmu Pasti & Alam : 1958 Lulus Tahun 1961
 (S.1) Universitas Islam Riau : 1998 Lulus Tahun 2002
 (S.2) UIN Suska Riau : 2016 Lulus Tahun 2018

RIWAYAT PEKERJAAN

1. PT. Pertamina Persero

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Partai Golkar
 2. Pengurus Masjid Raya Ittihadul Ummah Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu
 Kab. Kampar

KARYA ILMIAH

1. Skripsi : “Studi Evaluasi Terhadap Aktivitas Pendidikan Non Formal
 (Dakwah) di Lapas Pekanbaru (Studi Tinjauan Perspektif Ilmu
 Komunikasi)”
 2. Tesis : “Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil
 di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru”

- Hak Cipta Ditangguhkan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.